

BUKU AJAR

Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Unggulan dan Berdaya

Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

BUKU AJAR

**PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH BERBASIS
UNGGULAN DAN BERDAYA SAING**

Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2016**

PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH
BERBASIS UNGGULAN DAN BERDAYA SAING

Editor : Nasruddin, S.Pd
Desain Sampul : Nasaruddin, S.Pd
Setting & Lay Out Isi : Kusnandar Putra

ISBN : 978-602=69431-2-5

Diterbitkan oleh:

Hanin Publishing

Makassar Sulsel

HP 085255496907

penulismuslim@yahoo.com

Bekerjasama dengan

CV Ajrie Publisher

Jl. Binuang 16 RT/RW/07/01

Kel. Kayu Kubu, Kec. Guguk Panjang

Ngarai, Bukit Tinggi, 26115

HP 082391427439, ajriepublisher@gmail.com

Cetakan Pertama: Februari 2016

Isi 118 Halaman

Dilarang keras menerjemahkan, memfotocopy, memplagiat, baik sebagian atau seluruh buku ini. Sesungguhnya Allah –azza wa jalla- Maha Melihat, lagi Maha Mengetahui.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Garis Besar Pembahasan	1
B. Tujuan Pembelajaran	1
C. Spirit Otonomi Daerah	2
D. Pengembangan Potensi Daerah	4
E. Kelembagaan Publik dalam Menopang Potensi Daerah Berdaya Saing	5
F. Rangkuman	8
G. Soal Latihan	9
BAB II FENOMENA KEMISKINAN	10
A. Garis Besar Pembahasan	10
B. Tujuan Pembelajaran	10
C. Pengertian Kemiskinan	10
D. Ciri-Ciri Penduduk Miskin	13
E. Penyebab Kemiskinan	15
F. Pemberdayaan dalam Penanggulangan Kemiskinan	16
G. Rangkuman	22
H. Soal Latihan	23
BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA ALAM, AKSES MODAL DAN INFORMASI	24
A. Garis Besar Pembahasan	24
B. Tujuan Pembelajaran	24
C. Sumber Daya Alam	24
D. Akses Permodalan	26
E. Akses Informasi	27
F. Rangkuman	29
G. Soal Latihan	30
BAB IV. GAMBARAN DUA KABUPATEN DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH	31
A. Garis Besar Pembahasan	31
B. Tujuan Pembelajaran	31
C. Kabupaten Bantaeng	32

1. Struktur Ekonomi Kabupaten Bantaeng	33
2. Potensi Bidang Pertambangan	34
3. Potensi Bidang Perikanan	35
4. Potensi Bidang Pariwisata	36
5. Partisipasi Masyarakat	38
D. Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep)	39
1. Struktur Ekonomi Kabupaten Pangkep	39
2. Potensi Bidang Pertambangan	39
3. Potensi Bidang Perikanan	41
4. Potensi Bidang Pariwisata	42
E. Rangkuman	43
F. Soal Latihan	43
BAB V PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM MENGELOLA POTENSI DAERAH	44
A. Garis Besar Pembahasan	44
B. Tujuan Pembelajaran	44
C. Kinerja Aparatur	45
D. Proaktif Aparatur	48
E. Inovasi Aparatur	50
F. Egaliter Aparatur	52
G. Model Pengembangan Aparat	53
H. Rangkuman	55
I. Soal Latihan	55
BAB VI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA POTENSI DAERAH	56
A. Garis Besar Pembahasan	56
B. Tujuan Pembelajaran	56
C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah	57
D. Model Pengembangan Partisipasi	62
E. Rangkuman	63
F. Soal Latihan	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan Sulawesi Selatan Tahun 2012	6
2. Produksi Sektor Perkebunan Sulawesi Selatan Tahun 2012	6
3. Produksi Sektor Peternakan Sulawesi Selatan Tahun 2012	6
4. <i>Hyphothetical Minimum Needs</i>	12
5. Perbandingan Standar Kemiskinan	14
6. Persentase Kontribusi PDRB Persektor Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2012 Kabupaten Bantaeng	34
7. Persentase Kontribusi PDRB Persektor Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2012 Kabupaten Pangkep	39
8. Nilai Produksi Pertambangan Menurut Jenis Barang Tambang Di Kabupaten Pangkep Tahun 2008-2012	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng	37
2. Peta Wilayah Kabupaten Pangkep	41
3. Model Pengembangan Aparat Pemerintah Daerah	54
4. Model Pengembangan Partisipasi Masyarakat	63

PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penyusunan buku ajar ini dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditargetkan. Buku ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian hibah pascasarjana yang telah berlangsung selama 2 tahun. Isi buku ini sebagian besar merupakan hasil penelitian penulis pada 2 kabupaten yakni Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Secara umum buku ini menggambarkan potensi daerah pada dua kabupaten tersebut yang meliputi potensi ekonomi, pertanian perikanan, pertambangan dan pariwisata sebagai potensi unggulan dan berdaya saing.

Sebagai bahan untuk memperluas tulisan dalam buku ini, di bahas pula masalah fenomena kemiskinan dan pentingnya dukungan sumber daya alam, akses permodalan serta akses informasi sebagai bahan yang dapat memperkaya referensi pembahasan. Namun demikian penulis menyadari bahwa isi bahasan dalam buku ini masih kurang sempurna dan membutuhkan perbaikan baik dari isinya, kata dan kalimatnya yang masih perlu koreksi dari para mahasiswa dan sejawat yang membaca. Tentu semua koreksi akan kami terima dengan senang hati, dan atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 15 September 2015

Penulis

Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. Garis Besar Pembahasan

Bab ini membahas tiga hal utama yakni Spirit Otonomi Daerah, Pengembangan Potensi Daerah, dan Kelembagaan Publik dalam Menopang Potensi Daerah Berdaya Saing. Di era otonomi daerah, setiap daerah kabupaten/kota dapat mengoptimalkan potensi spesifik yang ada untuk meningkatkan daya saing. Dengan daya saing yang baik, produk lokal dapat berkompetisi dengan produk luar sehingga dapat menambah jumlah pemasukan daerah. Penetapan strategi dan metode pengembangan potensi daerah merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan potensi daerah berbasis IPTEK. Kelembagaan publik di daerah merupakan *stakeholder* dan merupakan organ pemerintah daerah maupun swasta yang berkewajiban menyukseskan pembangunan di daerah untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan spirit otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah
2. Menjelaskan pentingnya pengembangan potensi daerah yang dimaknai sebagai sumber-sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Membedakan jenis-jenis potensi daerah sebagai sumber daya di daerah
4. Menjelaskan pentingnya peran kelembagaan publik sebagai *stakeholder* pengembangan potensi daerah

C. Spirit Otonomi Daerah

Tugas dan kewajiban pemerintahan negara adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan tugas serta kewajiban pemerintahan daerah merupakan turunan dari tugas dan kewajiban pemerintahan negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 butir 6 dinyatakan “Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa hak Pemerintah Daerah dalam pasal 21(UU 32/04) adalah mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, dan mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Sedangkan kewajiban daerah yang diatur dalam pasal 22 (UU 32/04) antara lain; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan mengembangkan sumber daya produktif di daerah.

Hak dan kewajiban pemerintah daerah tersebut bermakna bahwa pemerintah kabupaten dan kota harus memiliki visi yang inovatif dan misi yang berorientasi membangun kabupaten/kota yang mandiri, produktif dan relegius serta kompetitif. Oleh sebab itu setiap daerah seyogyanya memiliki program unggulan yakni: (1) penataan sumber daya manusia yang mencakup peningkatan kualitas, penempatan aparatur sesuai keahliannya dan pengkaderan SDM pemerintahan yang memiliki semangat kewirausahaan, inovatif, cerdas dan memiliki pengabdian yang tinggi; (2) menjadikan wilayah kabupaten/kota sebagai wilayah agropolitan yang memiliki kompetisi dibidang pertanian, mengembangkan ekonomi kelautan dengan sasaran peningkatan kinerja sektor perikanan dan pengembangan wilayah pesisir (Sumihardjo, 2008).

Tujuan utama otonomi daerah khususnya di bidang ekonomi adalah terbukanya peluang pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah (Syaukani, Affan Gaffar.dan Ryaas Rasyid, 2007). Dengan demikian akan lahir berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Hingga tahun 2009 Indonesia memiliki kurang lebih 500 kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota tersebut memiliki daya saing berbasis potensi daerah. Filosofi otonomi

daerah adalah bahwa dengan keleluasaan yang dimiliki daerah, maka daerah dapat mengelola dan memecahkan pembangunan yang ada di daerah. Hal tersebut sejalan dengan pengertian otonomi daerah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dengan prakarsanya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah serta segala kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu daerah harus memiliki kebijakan-kebijakan yang tepat, institusi-institusi yang sesuai, dan karakteristik ekonomi yang tumbuh dengan baik dalam mengembangkan potensi daerah.

Permasalahan utama dalam mengembangkan otonomi daerah adalah kurang optimalnya sumberdaya manusia di daerah dan belum adanya regulasi yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaku administrasi publik untuk pemberdayaan wilayahnya. Pejabat administrasi publik lambat merespon adanya regulasi yang terkait kebutuhan publik dan bahkan merugikan kepentingan publik baik di bidang kesejahteraan, ekonomi, politik, sosial budaya maupun keamanan. Permasalahan yang terkait dengan bidang ekonomi seperti ketersediaan dan distribusi pengelolaan sumberdaya alam yang tidak merata serta menimbulkan kecemburuan sosial, membutuhkan regulasi yang transparan dan akuntabilitas yang baik. Sehingga dapat dikelola secara adil dan merata bagi kepentingan masyarakat di daerah. Persoalan di luar bidang ekonomi perlu pula dicermati seperti pola pikir pejabat dan aparat publik yang cenderung semakin primordial berdasarkan kedaerahan dan kesukuan. Hal tersebut dapat memicu konflik terutama terhadap investor yang akan datang membuka investasi di daerah. Kemerossotan moral tersebut dapat menghambat pengembangan potensi yang dimiliki daerah. Gangguan keamanan, mental korup, pungutan liar, birokrasi yang kaku dan berbelit-belit dan pemberian pelayanan yang diskriminatif dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi daerah dalam mengembangkan potensi daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah yang benar-benar menjalankan otonomi daerah dengan mengandalkan potensi yang dimilikinya, perlu mempersiapkan strategi kebijakan yang handal, cerdas sesuai dengan kemampuan melaksanakannya.

D. Pengembangan Potensi Daerah

Potensi daerah dimaknai sebagai sumber-sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai upaya pengembangan kemampuan daerah (Sumihardjo, 2008). Dinyatakan bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan potensi daerah yang paling banyak melibatkan hajat hidup orang banyak dan paling banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi angka keterlibatan masyarakat pada sumber-sumber alam tertentu, maka semakin tinggi kontribusi sumber-sumber tersebut terhadap perkembangan ekonomi setempat. Indikasinya tampak pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada setiap daerah yang terdiri dari sembilan sektor yakni: (1) pertanian, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) bangunan/konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) perhubungan, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa. PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan yang telah dicapai, dan melalui PDRB dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi secara regional maupun sektoral.

Pelaksanaan otonomi daerah membawa implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pemecaran sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Glasson dalam Tomo (2012) mengatakan bahwa kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonominya dan faktor ini merupakan faktor utama. Perubahan wilayah kepada kondisi yang lebih makmur tergantung pada usaha-usaha di daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa serta usaha-usaha pembangunan yang diperlukan. Berdasarkan teori basis ekonomi, faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad dalam Tomo, 2012). Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*). Oleh sebab itu pembangunan daerah diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat serta aparat pemerintah daerah yang tangguh dan inovatif, karena setiap daerah mempunyai keadaan yang berbeda, mempunyai

karakteristik tersendiri, laju pertumbuhan ekonomi maupun potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Penetapan strategi dan metode pengembangan potensi daerah merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan potensi daerah berbasis IPTEK berdasarkan UU no 32/2002 mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan UU No 18/2002 mengenai IPTEK. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan pemerintah berdasarkan RPJM yaitu pembangunan infrastruktur dan kelembagaan, pendampingan dan menumbuhkan klaster industri serta memudahkan wirausaha daerah pada pemodal. Selain itu, untuk meningkatkan IPTEK lokal guna mendukung pengembangan potensi spesifik daerah, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk membantu penelitian dan pengembangan IPTEK lokal dan pembentukan dewan riset daerah (DRD) serta science centre. Dengan demikian, diharapkan pengembangan IPTEK lokal dapat optimal sehingga peningkatan daya saing daerah melalui potensi spesifik yang berkualitas.

E. Kelembagaan Publik dalam Menopang Potensi Daerah Berdaya Saing

Kelembagaan publik di daerah merupakan *stakeholder* dan merupakan organ pemerintah daerah maupun swasta yang berkewajiban menyukseskan pembangunan di daerah untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kelembagaan publik yang dimaksud seperti dinas-dinas daerah, badan, perbankan, lembaga keuangan non bank dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya adalah sebagai institusi yang sepenuhnya bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan khususnya menggali sumberdaya unggulan daerah yang berdaya saing. Fungsi dan peran dinas pertanian, perikanan dan kelautan sangat strategis dalam mengeksplorasi dan mengolah sumber-sumber kekayaan alam bernilai tinggi baik di darat maupun di laut. Begitupun kelembagaan publik yang dikelola oleh pihak swasta dapat membantu mengeksplorasi sumber daya unggulan disektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan di Sulawesi Selatan. Hingga tahun 2012 produksi sektor pertanian yang tertinggi nilai produksinya selain beras adalah jagung, pisang dan ubi kayu, dan produksi sektor perikanan yang tertinggi adalah perikanan tangkap dan perikanan tambak. Kemudian produksi sektor perkebunan yang tertinggi adalah kakao dan kelapa, sedangkan produksi sektor peternakan yang tertinggi adalah sapi, babi dan kambing. Semua sektor tersebut merupakan sektor unggulan yang dapat dikembangkan oleh kelembagaan publik sebagai *stakeholder* pemerintah daerah. Data sektor tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan Sulawesi Selatan Tahun 2012

No	Pertanian (Ton)		Perikanan (Ton)	
	1	Jagung	1.457.879	Perikanan Tangkap
2	Kedelei	32.745	Budidaya Keramba	217
3	Kentang	18.420	Budidaya Kolam	6.987
4	Nanas	2.265	Budidaya Sawah	2.627
5	Pisang	153.540	Budidaya Tambak	744.385
6	Ubi Jalar	107		
7	Ubi Kayu	452.404		

Sumber: Data Sekunder Badan Kordinasi Penanaman Modal Propinsi Sulawesi Selatan, 2014

Sedangkan produksi sektor perkebunan hingga tahun 2012 terlihat dalam tabel 2 berikut

Tabel 2. Produksi Sektor Perkebunan Sulawesi Selatan Tahun 2012

Perkebunan (Ton)					
1	Kelapa Sawit	34.126	9	Kemiri	20.321
2	Kakao	199.006	10	Kenari	240
3	Karet	9.311	11	Lada	4.703
4	Tebu	32.132	12	Sagu	1.065
5	Kopi	31.475	13	Teh	138
6	Kelapa	83.732	14	Tembakau	3.629
7	Cengkeh	9.227	15	Vanili	630
8	Jambu Mete	17.127			

Sumber: Data Sekunder Badan Kordinasi Penanaman Modal Propinsi Sulawesi Selatan, 2014

Adapun produksi sektor peternakan hingga tahun 2012 terlihat dalam tabel 3 berikut

Tabel 3. Produksi Sektor Peternakan Sulawesi Selatan Tahun 2012

No	Peternakan (Ekor)	
1	Sapi	1.084.127
2	Babi	629.091
3	Domba	404
4	Kambing	539.900
5	Kerbau	100.695
6	Kuda	146.041

Sumber: Data Sekunder Badan Korrdinasi Penanaman Modal Propinsi Sulawesi Selatan, 2014

Demikian pula dinas pariwisata akan menjadi institusi yang lebih *entrepreneurship* mengeksplorasi objek-objek wisata baik di darat maupun wisata laut. Seperti rencana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjual dan mengembangkan 12 pulau-pulau di Kabupaten Selayar dengan membangun *home stay* dan *resort* yang akan dikelola oleh pihak swasta. Pulau-pulau tersebut merupakan objek wisata bahari di Kepulauan Selayar dengan sistem bagi hasil melalui kontrak kerja. Kepulauan Selayar masuk dalam tiga besar kawasan yang masih terjaga keaslian terumbu karang dengan grade 35. Total luas Kepulauan Selayar juga mencapai 200 km persegi yang mampu menyamai Quanjivan di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maldin. Hal tersebut menjadi sebuah pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam hal ini dinas pariwisata agar mampu melihat dengan keteguhan hati betapa potensi unggulan daerah dapat dikembangkan. Untuk membenahi potensi unggulan yang ada, tentu saja peran dan fungsi lembaga keuangan baik perbankan maupun lainnya menjadi sangat penting untuk mensuplai anggaran atau dana segar. Ketika pengembangan potensi unggulan tersebut dibiayai dan berhasil tentu efeknya akan meningkatkan penghasilan/pendapatn masyarakat. Dan peningkatan pendapatan masyarakat akan berefek pula meningkatnya tabungan masyarakat, dan peningkatan tabungan masyarakat akan menjadi investasi lagi dunia perbankan. Siklus tersebut dapat digambarkan sebagaimana skema gambar 1 berikut:



F. Rangkuman

Masalah pokok yang dikaji adalah masih banyaknya potensi daerah berbasis unggulan dan berdaya saing yang kurang di kelola pemerintah daerah yang dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan potensi daerah yang kurang di kelola tersebut, mengakibatkan rendahnya pendapatan asli daerah dan semakin tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh sebab itu penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan secara khusus yakni: seberapa jauh kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber-sumber potensi daerah yang berbasis unggulan dan berdaya saing. Beberapa variabel yang terkait dengan kurang terkelolanya potensi daerah tersebut, antara lain: rendahnya kemampuan aparat pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah, dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program pengembangan potensi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 mengenai pemanfaatan sumber daya alam, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, maka daya saing yang dimaksud dalam konsideran Undang-Undang tersebut adalah kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik, sumber daya aparatur, serta masyarakat yang membangun kemampuan daerah. Ketika bola daya saing tersebut telah digelindingkan, apakah daerah mampu mengembangkan sektor unggulan dan mampu mewujudkan suasana kompetisi antar daerah untuk kesejahteraan bagi rakyatnya.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah harus berupaya membangun daerahnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat, dan daya saing daerah. Pengembangan daya saing sektor unggulan tersebut akan terlihat mana yang paling banyak melibatkan hajat hidup orang banyak dan paling banyak menyerap tenaga kerja dari sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia yang yang dapat mengangkat daya saing daerah.

Pengembangan sektor unggulan yang dimiliki daerah tercermin pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam rencana jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Selain itu sektor unggulan tercermin

pula dalam produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan cerminan perkembangan perekonomian daerah secara makro yang di dalamnya secara rinci menggambarkan daya dukung sektor dan sub sektor potensi riil terhadap PDRB, Artinya ketika daerah ingin memacu daya saing berbasis potensi daerah, maka peta yang dijadikan pedoman pengembangan adalah melalui pengembangan sektor-sektor serta subsektor-subsektor PDRB. Potensi daerah yang dimaksud dalam buku ini adalah sumberdayaalam, sumber daya buatan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Potensi sumber daya alam daerah pada umumnya meliputi: potensi bidang pertanian, kelautan, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral . Sedangkan potensi sumber daya manusia berkaitan dengan keahlian yang dimiliki dan kemampuan bekerjasama untuk kemajuan setiap daerah. Kelembagaan publik sebagai institusi yang sepenuhnya bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan khususnya menggali sumberdaya unggulan daerah yang berdaya saing.

G. Soal Latihan

1. Jelaskan spirit otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah
2. Jelaskan pentingnya pengembangan potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Sebut dan jelaskan jenis-jenis potensi daerah sebagai sumber daya di daerah
4. Jelaskan pentingnya peran kelembagaan publik sebagai *stakeholder* pengembangan potensi daerah

BAB II

FENOMENA KEMISKINAN

A. Garis Besar Pembahasan

Pembahasan dalam bab ini terkait dengan konteks strategi nasional penanggulangan kemiskinan dimana kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Selain itu dibahas pula ciri-ciri penduduk miskin, penyebab kemiskinan dan pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan. Pengembangan potensi daerah menjadi suatu pilihan yang bersifat strategis tidak terlepas dari fenomena kemiskinan yang membutuhkan penanggulangan agar masyarakat dapat menikmati kehidupan yang bermartabat.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan fenomena kemiskinan dan strategi nasional penanggulangannya
2. Menjelaskan ciri-ciri penduduk miskin dan penyebab kemiskinan.
3. Menjelaskan pengembangan potensi daerah sebagai suatu pilihan yang bersifat strategis dalam menanggulangi kemiskinan

C. Pengertian Kemiskinan

Secara harafiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin diberi arti “tidak berharta-benda” (Poerwadarminta, 1986). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak-mampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Pengertian kemiskinan dapat dikelompokkan ke dalam empat bentuk, yakni kemiskinan *struktural*, kemiskinan *kultural*, kemiskinan *relatif*, dan kemiskinan *absolut*. Kemiskinan struktural terjadi karena seseorang kurang mampu mendapatkan akses

kehidupan khususnya kebutuhan dasar seperti pangan, papan, kesehatan dan hak-hak kebutuhan lainnya, akibat kebijakan pemerintahan yang kurang menguntungkan. Sedangkan miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Seseorang termasuk golongan miskin absolute apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.

Menurut Kartasmita (1997), kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang terburuk yang diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan martabat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sedangkan Nasikun (1995) menyatakan “kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap”.

Pengembangan potensi daerah menjadi suatu pilihan yang bersifat strategis tidak terlepas dari fenomena kemiskinan yang membutuhkan penanggulangan agar masyarakat dapat menikmati kehidupan yang bermartabat. Dalam konteks strategi nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK), kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, 2006).

World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik dan sosial. Kekurangan fisik adalah ketidakcukupan kebutuhan dasar materi dan biologis (*basic material and biological needs*), termasuk kekurangan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Di sisi lain, ketidakcukupan sosial adalah adanya resiko kehidupan, kondisi ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kepercayaan diri yang kurang. Peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen (Gunawan dan Sugiyanto, 2004), mengatakan bahwa ada beberapa cara pendekatan untuk mengetahui apa itu kemiskinan. Sen menawarkan pendekatan melalui kelaparan atau akses seseorang terhadap pangan. Menurut Sen, Seseorang akan mendapatkan makanan jika dia dikenal secara sosial dan legal. Jadi, walaupun ketersediaan pangan melimpah, Sen berpendapat “*Starvation is seen as the result of his inability to establish entitlement to enough food*” Oleh karena itu, Sen mengatakan bahwa untuk memberantas kemiskinan adalah dengan memberikan kesempatan/akses kepada orang miskin terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Schiller dalam Gunawan dan Sugiyanto (2008) berpendapat bahwa ada beberapa kriteria yang termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Variabel-variabel tersebut adalah asupan kalori, konsumsi energi, kebutuhan akan pakaian, transportasi, dll.

Tabel 4. *Hypothetical Minimum Needs.*

Category	Amount
Minimum food requirements	2471 calories per day
Minimum fuel requirements	37 KW-hours
Minimum shelter requirements	60 Board feet
Minimum clothing requirements	4 pounds
Minimum transportation requirements	7 miles

Sumber : Schiller, 1989 (Gunawan dan Sugiyanto, 2008)

D. Ciri-Ciri Penduduk Miskin

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan 14 variabel/kriteria untuk mengkategorikan penduduk miskin. Variabel-variabel atau kriteria-kriteria itu adalah: luas lantai bangunan; jenis lantai bangunan yang digunakan; jenis dinding yang digunakan; ada tidaknya jamban/toilet; ada tidaknya sumber penerangan rumah tangga; sumber air minum; jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak sehari-hari; jumlah konsumsi daging, susu, ayam; pengeluaran untuk barang sandang; tingkat konsumsi makanan; pengeluaran untuk kesehatan; jumlah penghasilan kepala rumah tangga dalam sebulan; tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; dan jumlah tabungan yang dimiliki.

Seseorang akan dikategorikan miskin oleh BPS jika memenuhi minimal 8 dari 14 kriteria/variabel tersebut. Kriteria-kriteria tersebut nampaknya memang sangat tidak manusiawi tetapi itulah potret atau gambaran kemiskinan di Indonesia yang masih sangat jauh dari layak. Terlebih jika kita bandingkan standar yang ditetapkan oleh BPS dengan *World Bank*. Menurut *World Bank*, salah satu kriteria orang miskin di Indonesia adalah mereka yang berpenghasilan di bawah dua dollar per hari atau sekitar Rp. 19.000,-. Standar kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS tersebut sangatlah rendah. Apalagi jika dibandingkan dengan standar kemiskinan yang ditetapkan oleh PBB (MDG'S), terlebih lagi jika di bandingkan dengan *World Bank*. Yang lebih menyedihkan lagi ketika di bandingkan standar kemiskinan BPS (2007) tetap jauh lebih rendah jika di bandingkan dengan standar kemiskinan di Amerika Serikat sekitar 46 tahun yang lalu (1963).

Selain BPS, standar kemiskinan yang digunakan para peneliti dan ilmuwan dalam menganalisis persoalan-persoalan kemiskinan, sering pula digunakan standar versi Sayogyo. Guru Besar Institut Pertanian Bogor ini menyetarakan penghasilan seorang yang tergolong miskin setara dengan 360 kg beras setahun. Jika harga beras perkilogram sebanyak Rp. 8.500 rupiah, maka total penghasilan adalah sebanyak $360 \text{ kg} \times \text{Rp } 8.500 = \text{Rp. } 3.060.000$ pertahun, atau sebanyak Rp.255.000 perbulan, atau Rp.8.500 perhari. Nampaknya perhitungan Sayogyo sama dengan perhitungan BPS tahun 2007.

Tabel 5. Perbandingan Standar Kemiskinan

Parameter	BPS (versi Maret 2007)	World Bank	PBB (MDG'S)	Amerika Serikat Tahun 1963 (Schiller, 1989)
Pendapatan (per orang per hari)	Rp.5.500,- (\$0,6)	Rp.19.000,-(\$2)	Rp. 9.500,- (\$1)	Rp.29.735,-(\$3,13)
Asupan Kalori (per hari)	2100	-	-	2471
Penerangan	Lampu Templok, Tidak ada listrik (0 KWh).	-	-	37 KWh

Sumber: Gunawan dan Sugiyanto, 2008

Berdasarkan standar kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan mendesak bagi Indonesia. Pada tahun 2006 hampir 35 juta penduduk masih hidup dalam kemiskinan. Jumlah ini masih melebihi total jumlah penduduk miskin di seluruh Asia Timur, tidak termasuk China. Selain itu, angka kemiskinan nasional ini menutupi gambaran tentang kelompok besar penduduk 'hampir-miskin' di Indonesia, yang hidupnya mendekati garis kemiskinan. Sekitar 40 persen dari jumlah penduduk keseluruhan, atau mendekati 90 juta penduduk, hidup dengan penghasilan antara 1 dan 2 dollar AS per hari. Sesungguhnya, meskipun Indonesia sekarang merupakan negara berpenghasilan menengah, jumlah penduduknya yang hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dollar AS per hari sama besar dengan jumlah penduduk miskin di negara-negara berpenghasilan terendah di wilayah Asia Timur.

Sangat rentannya kelompok penduduk hampir-miskin ini dibuktikan dengan meningkatnya angka kemiskinan yang dipicu oleh kenaikan harga beras pada tahun 2006, yang mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dari 16,0 persen menjadi 17,7 persen. Indonesia juga mengalami kemajuan yang sangat lamban dalam beberapa aspek penting kemiskinan lainnya selain penghasilan. Angka kematian ibu hamil, angka partisipasi siswa sekolah menengah tingkat pertama dan angka gizi buruk, misalnya, belum juga membaik dengan cukup cepat dan masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasannya.

Indonesia juga ditandai dengan tingginya kesenjangan dan ketimpangan antarwilayah. Masih ada beberapa wilayah Indonesia di mana tingkat dan karakteristik kemiskinan lebih mirip dengan sebagian negara berpenghasilan terendah di dunia, serta masih adanya kantong-kantong kemiskinan bahkan di wilayah-wilayah Indonesia yang lebih makmur.

Pemerintah Indonesia jelas memiliki komitmen untuk menanggulangi kemiskinan seperti tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengahnya (RPJM) tahun 2004-2009, yang hal itu merupakan bagian dari Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang digariskan oleh pemerintah. Selain ikut menandatangani Sasaran Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) untuk tahun 2015, dalam rencana jangka menengahnya pemerintah telah menjabarkan target-target utama penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2009. Hal ini meliputi target-target yang ambisius namun relevan, seperti mengurangi angka kemiskinan dari 18,2 persen pada 2002 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009, meningkatkan rasio partisipasi siswa sekolah menengah pertama dari 79,5 persen pada 2002 menjadi 98 persen pada tahun 2009, dan menurunkan angka kematian ibu hamil dari 307 per 100.000 kelahiran pada 2002 menjadi 226 pada tahun 2009. Target ini diupayakan agar Indonesia berhasil melewati ambang batas kemiskinan dan menjadi salah satu negara baru berpenghasilan menengah di dunia. Paling tidak target tersebut sudah bisa tercapai hingga tahun 2010.

E. Penyebab Kemiskinan

Jika dikelompokkan penyebab kemiskinan, maka ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Kemiskinan dapat disebabkan pula oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan disebabkan oleh perbedaan

akses dalam modal. Sedangkan lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse sangat relevan dalam menjelaskan fenomena kemiskinan yang terjadi di negara-negara terbelakang. Menurutnya negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Kemiskinan memang merupakan momok utama dalam perekonomian suatu negara. Makin banyak kemiskinan di suatu negara, menggambarkan ketidakberesan negara dalam mengurus rakyatnya. Selain itu, kemiskinan juga merupakan potret adanya suatu kegagalan ekonomi. Terlebih jika kemiskinan telah berlangsung sejak lama. Bila hal ini sudah terjadi maka kemiskinan ini bukan merupakan fenomena sesaat tetapi sudah menjadi fenomena struktural yang harus diselesaikan dengan cara yang sistematis dan berkelanjutan.

Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.

F. Pemberdayaan dalam Penanggulangan Kemiskinan

Penerapan pemberdayaan paling banyak digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijo (2007), upaya penanggulangan kemiskinan secara konseptual dapat dilakukan oleh empat jalur strategis, yaitu perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dan perlindungan sosial. Strategi perluasan kesempatan ditujukan menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan dua strategi berikutnya yakni

peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial bertujuan agar seseorang dapat memiliki kekuatan (daya) atau kewenangan sehingga orang tersebut tidak termarginalisasi lagi melainkan sadar akan harga dirinya, harkatnya, dan martabatnya. Dengan kapasitas seseorang akan memiliki kemandirian, tahan uji, pintar, jujur, berkemampuan kreatif, produktif, emansipatif, tidak tergantung, proaktif, dinamis, terbuka dan bertanggung jawab dalam mengatasi semua masalah dan menjawab tantangan untuk mencapai kemajuan.

Sejak tahun 2004, pemerintah Indonesia melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan melalui bentuk Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net Program*), data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil, pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN. Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri (Prokesos KUBE KMM), Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra), Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra), Kredit Usaha Kecil Menengah, dan lain-lain. Kemudian sejak tahun 2009 dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono-Budiono digalakkan pula Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Meskipun masih perlu usaha penyempurnaan dan perbaikan dari program tersebut agar benar-benar mampu membangun prakarsa dan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan usaha dan tingkat kesejahteraannya. Mengenai penanganan permasalahan kemiskinan ini beberapa usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun swasta tersebut menunjukkan bahwa adanya kepedulian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan seperti yang tertuang dalam UUD Tahun 1945.

Penanggulangan kemiskinan terlihat pula dalam strategi pemenuhan kebutuhan dasar yang dicanangkan dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) antara lain meliputi: (1) kecukupan dan mutu pangan, (2) akses mutu layanan kesehatan, (3) akses mutu layanan pendidikan, (4) kesempatan kerja dan berusaha, (5) akses layanan perumahan, (6) akses terhadap air bersih dan aman, serta sanitasi, (7) kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (8) perbaikan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (9) pemenuhan jaminan rasa aman, dan (10) meningkatkan partisipasi.

(1) Kecukupan dan Mutu Pangan

Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan daya beli, ketersediaan pangan yang merata,

serta mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap beras dan meningkatkan terus upaya diversifikasi pangan selain beras seperti jagung, sagu, ubi jalar, ubu kayu dan bahan pangan lainnya yang tumbuh secara lokal. Selain itu kecukupan pangan dapat pula dilakukan dengan peningkatan asupan kalori penduduk miskin dan memperbaiki status gizi bayi, anak balita dan ibu. Kekurangan asupan kalori yang terjadi pada saat ketersediaan pangan nasional cukup memadai, menunjukkan adanya masalah dalam keterjangkauan pangan yang bermutu.

(2) Akses Mutu Layanan Kesehatan

Masyarakat miskin harus diberdayakan untuk memperoleh akses mutu layanan kesehatan dan peningkatan status kesehatan yang akan berdampak pada tingginya daya tahan mereka untuk bekerja dan mencari nafkah, membantu kemampuan anak-anak mereka untuk tumbuh dan berkembang, dan meningkatkan derajat kesehatan ibu. Pemberdayaan mutu layanan kesehatan dimaksudkan pula agar pemahaman perilaku hidup sehat dapat meningkat, mengurangi angka kematian bayi, serta menurunkan dampak timbulnya penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis paru, dan HIV/AIDS serta kebiasaan merokok. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, pendapat NU dan MUI tentang bahaya dan larangan merokok dapat menjadi referensi dalam proses pemberdayaan masyarakat.

(3) Akses Mutu Layanan Pendidikan

Masyarakat miskin diupayakan seoptimal mungkin dapat memperoleh layanan pendidikan formal dan non formal dengan memudahkan dan menurunkan biaya pendidikan, mencukupkan jumlah prasarana dan sarana pendidikan, jumlah guru yang bermutu baik di daerah pedesaan, daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan, serta jumlah sebaran dan mutu program kesetaraan pendidikan dasar maupun pendidikan menengah melalui pendidikan non formal.

(4) Kesempatan Bekerja dan Berusaha

Pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui peningkatan peluang untuk mengembangkan usaha, perlindungan terhadap aset usaha, mengatasi diskriminasi perolehan upah serta mengadvokasi perlindungan kerja khususnya bagi pekerja anak

dan perempuan pembantu rumah tangga. Memberi informasi akses modal, menambah keterampilan dan pengetahuan yang dapat menyebabkan mereka mampu mengembangkan usaha. Masalah pengangguran dan kurangnya perluasan kesempatan kerja akibat krisis ekonomi akan meningkatkan jumlah orang miskin terutama oleh usia muda yaitu usia 15-19 tahun merupakan tantangan tersendiri dalam kegiatan program pemberdayaan mengingat jumlahnya yang cukup besar sekitar 36,7 persen dari jumlah penduduk.

(5) Akses Layanan Perumahan

Tempat tinggal yang sehat dan layak merupakan kebutuhan primer yang harus dinikmati oleh kaum miskin. Kondisi perumahan sering dipakai untuk mengenali penduduk miskin seperti luas lantai bangunan; jenis lantai bangunan yang digunakan; jenis dinding yang digunakan; ada tidaknya jamban/toilet; ada tidaknya sumber penerangan rumah tangga; sumber air minum dan sanitasi pembuangan limbah. Pemenuhan hak untuk mendapatkan akses perumahan yang sehat dan layak sama halnya dengan hak-hak yang didapatkan oleh kelompok masyarakat lainnya. Upaya pemberdayaan dilakukan agar mereka mendapatkan pendanaan untuk membayar biaya awal untuk mendapatkan perumahan sangat sederhana dengan harga murah, meringankan pajak serta memberikan harga tanah yang terjangkau

(6) Akses Terhadap Air Bersih dan Aman, Serta Sanitasi

Penyediaan air bersih, dan jaringan distribusi air yang terjangkau merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat. Air bersih didefinisikan sebagai air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air bersih disini termasuk air minum dan air minum non perpipaan (sumur dalam, sungai, danau dan *small scale provider*). Masyarakat miskin diberdayakan agar mereka mudah untuk mendapatkan air bersih dan aman. Kesulitan memperoleh air bersih dan aman umumnya dirasakan oleh mayoritas penduduk terutama rumah tangga yang tinggal di daerah yang sulit air.

(7) Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah

Masyarakat miskin khususnya di pedesaan sangat tergantung hidupnya pada struktur penguasaan dan pemilikan tanah terutama lahan pertanian. Tingkat pendapatan rumah tangga petani ditentukan oleh luas tanah pertanian yang dikuasai. Oleh sebab itu pemberdayaan ditujukan untuk membantu mengatasi meluasnya sengketa agraria agar masyarakat khususnya petani miskin mendapatkan nilai dan rasa keadilan. Konflik pertanahan yang sering terjadi semakin mencerminkan ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dan mempengaruhi kondisi kemiskinan di pedesaan dan masyarakat petani penggarap. Penguasaan tanah dalam pembangunan yang mengandalkan modal besar seperti revolusi hijau, perkebunan dan konsesi hutan produksi, semakin mencerminkan potret kemiskinan di pedesaan dan ketidakadilan agraria. Oleh sebab itu masyarakat miskin perlu dibantu untuk mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan tanah secara optimal dan mengadvokasi mereka dalam penyelesaian konflik agraria secara jelas dan tuntas agar dapat memecahkan kemiskinan dan tidak menimbulkan kemiskinan baru.

(8) Perbaikan Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Kehidupan masyarakat miskin di daerah pedesaan, daerah pinggiran hutan, kawasan pesisir, dan daerah pertambangan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan. Sedangkan masyarakat miskin di perkotaan umumnya tinggal di lingkungan pemukiman yang buruk dan tidak sehat, misalnya di daerah rawan banjir dan daerah yang tercemar. Tugas utama dalam proses pemberdayaan adalah menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi serta rasa kewajiban bagi semua orang terutama masyarakat miskin untuk menjaga dan melestarikannya, misalnya menjaga kuantitas dan kualitas air yang dimanfaatkan, menjaga upaya penggundulan hutan serta sedimentasi, memelihara saluran-saluran air atau irigasi agar sistem kinerjanya tidak semakin rusak, sehingga dapat menambah pasokan air baku, baik untuk kebutuhan air minum maupun untuk meningkatkan intensitas tanam. Kemudian meningkatkan pengetahuan hak atas sumberdaya alam terkait dengan hak atas akses dan keadilan dalam pemanfaatannya, sehingga relevan bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini dimaksudkan pula agar mereka tidak semakin terpinggirkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

(9) Pemenuhan Jaminan Rasa Aman

Masyarakat miskin seringkali menghadapi berbagai tindak kekerasan yang menyebabkan tidak terjaminnya rasa aman. Tindak kekerasan tersebut disebabkan oleh konflik sosial, ancaman terorisme, dan ancaman dalam bentuk eksploitasi dalam perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*), krisis ekonomi, penyebaran penyakit menular, dan peredaran obat-obat terlarang. Pemberdayaan ditujukan agar masyarakat miskin mendapat hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya agar terhindar dari berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi, dan rasa tidak aman tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan atau konflik sosial hampir setiap hari dan malam diliput oleh media televisi maupun media cetak seperti kekerasan komunal, kekerasan yang bernuansa separatis, kekerasan masyarakat dengan negara, kekerasan yang berhubungan dengan persoalan perburuhan yang tentu saja dapat merusak tatanan sosial yang ada, menciptakan rasa tidak aman dan mengurangi minat orang luar untuk mengunjungi wilayah tersebut. Dalam kurikulum Perguruan Tinggi Muhammadiyah, sejak tahun 2003 dirumuskan pendidikan *civic education* sebagai pengganti mata kuliah kewiraan. Hal tersebut bertujuan agar kesadaran berkehidupan sosial yang lebih nyaman, toleran, yang didasari oleh nilai-nilai kasih sayang, penghormatan terhadap hak-hak publik, serta tidak merusak tatanan sosial dapat terpelihara dengan baik. Kesempatan ini dapat di implementasikan oleh para mahasiswa dalam membantu mensosialisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat.

(10) Meningkatkan Partisipasi

Partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan dimaksudkan agar mereka tidak terkooptasi dari kehidupan sosial dan membuat mereka semakin berdaya untuk menyampaikan aspirasinya. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang cenderung memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek dan mengabaikan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan seharusnya telah berubah menjadi sebaliknya, yakni meningkatkan partisipasi mereka menyampaikan suara si miskin dalam tahap perumusan, pelaksanaan, pemanataan, maupun evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Berbagai kasus penggusuran di perkotaan, pemutusan hubungan kerja sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan

keputusan. Oleh sebab itu pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dapat membantu memperkuat posisi tawar untuk mempengaruhi kebijakan baik melalui kelompok-kelompok, maupun kelembagaan organisasi di pedesaan.

Kelompok atau organisasi dilingkungan masyarakat baik yang tumbuh atas kesepakatan masyarakat itu sendiri maupun atas bentukan secara formal dari pihak pemerintah seyogyanya menjadi wadah berhimpunnya kekuatan masyarakat untuk memelihara tradisi musyawarah agar pengambilan keputusan dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada kalangan pemerintah saja, melainkan melibatkan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat.

Selama ini, peran serta masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan. Dengan kondisi ini, partisipasi masyarakat “terbatas” pada implementasi atau penerapan program; masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar. Akhirnya partisipasi menjadi bentuk yang pasif dan tidak memiliki kesadaran kritis (Nasdian 2003). Pentingnya partisipasi tersebut karena akan menumbuhkan daya kreatif dalam dirinya sendiri sehingga menghasilkan pengertian partisipasi yang aktif dan kreatif mulai dari tahap pembuatan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi (Cohen dan Uphoff dalam Nasdian, 2003). Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis). Partisipasi juga membantu masyarakat miskin untuk melihat realitas sosial ekonomi yang mengelilingi mereka

G. Rangkuman

Kemiskinan sebagai kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik dan sosial. Kekurangan fisik adalah ketidak cukupan kebutuhan dasar materi dan biologis (*basic material and biological needs*), termasuk kekurangan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Kemiskinan dapat disebabkan pula oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan disebabkan oleh perbedaan akses dalam modal. Penanggulangan kemiskinan

terlihat pula dalam strategi pemenuhan kebutuhan dasar yang dicanangkan dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)

H. Soal Latihan

1. Jelaskan fenomena kemiskinan dan strategi nasional penanggulangannya
2. Jelaskan cirri-ciri penduduk miskin dan penyebab kemiskinan.
3. Jelaskan strategi pengembangan potensi daerah sebagai suatu pilihan yang bersifat strategis dalam menanggulangi kemiskinan
4. Sebutkan beberapa langkah strategi penanggulangan kemiskinan menurut versi SNPK

BAB III

DUKUNGAN SUMBER DAYA ALAM, AKSES MODAL DAN INFORMASI

A. Garis Besar Pembahasan

Pembahasan pada bab ini meliputi pentingnya dukungan sumber daya alam, akses permodalan serta akses informasi dalam mengembangkan potensi daerah. sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia dan sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. Akses permodalan dalam bentuk pemberian kredit usahatani dengan bunga yang ringan perlu untuk memungkinkan petani melakukan inovasi-inovasi dalam usaha taninya, serta mendorong petani untuk menggunakan secara produktif dengan bimbingan dan pengawasan yang teliti. Demikian pula informasi memegang peranan penting dalam memperkenalkan metode-metode baru, teknologi produksi baru, informasi pasar dan lain-lain.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan pentingnya dukungan sumber daya alam dalam pengelolaan potensi daerah yang berbasis unggulan dan berdaya saing
2. Menjelaskan tujuan dan manfaat permodalan dalam mengelola potensi ekonomi lokal daerah
3. Menjelaskan tujuan dan manfaat informasi untuk mendapatkan metode baru, teknologi produksi baru serta informasi pasar dari produk potensi daerah

C. Sumber Daya Alam

Salah satu kunci penanggulangan kemiskinan adalah dukungan sumberdaya alam sebagai potensi daerah yang dapat membantu ketersediaan pangan. Sumber daya alam memberikan kontribusi yang amat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam pengertian umum, sumber daya alam didefinisikan sebagai suatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Fauzi (2004), menyatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Grima dan Berkes (Fauzi 2004) mendefinisikan sumber daya sebagai

aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. Res (Fauzi 2004) mengatakan bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria, yakni:

- (1) Harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (*skill*) untuk memanfaatkannya
- (2) Harus ada permintaan (*demand*) terhadap sumber daya tersebut.

Selain dua kriteria tersebut, definisi sumber daya juga terkait pada dua aspek, yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan, dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya dan bagaimana teknologi digunakan (Fauzi 2004). Jika sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan umat manusia dikemudian hari. Jika sebaliknya justru akan merusak kehidupan generasi mendatang.

Menurut Lopez (Thomas *et al*, 2001), bahwa ekonomi yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari sumber daya alam tidak dapat melestarikan pertumbuhan dengan mengganti akumulasi modal fisik untuk modal alam yang semakin buruk. Dalam memahami sumber daya alam, ada dua pandangan yang umumnya digunakan. Pertama adalah pandangan konservatif atau sering disebut juga pandangan pesimis atau perspektif *Malthusian*. Dalam pandangan ini, resiko akan terkurasnya sumber daya alam menjadi perhatian utama. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena adanya faktor ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi terhadap sumber daya alam dimasa yang akan datang. Dalam perspektif Malthus, sumber daya alam yang terbatas tidak akan mampu mendukung pertumbuhan penduduk yang cenderung tumbuh secara eksponensial. Pandangan kedua adalah pandangan eksploitatif atau sering juga disebut sebagai perspektif *Ricardian*. Dalam pandangan ini dikemukakan bahwa sumber daya alam dianggap sebagai mesin pertumbuhan (*engine of growth*) yang mentransformasikan sumber daya alam ke dalam “*man made capital*” yang pada gilirannya akan menghasilkan produktifitas yang lebih tinggi di masa mendatang.

Dalam sistem usahatani terdapat sumber daya fisik, biologis dan manusia yang berbeda. Sumber daya fisik seperti tanah, air dan udara saling berinteraksi hingga menciptakan kondisi suhu, angin, curah hujan tertentu dan lain-lain yang unik. Kondisi ini mempengaruhi berfungsinya sumber daya biologis (misalnya tanaman, ternak, burung, serangga, gulma dan mikroorganisme). Organisme yang hidup ini, dengan daur hidup dari

kelahiran, pertumbuhan, perkembangbiakan dan kematian, masing-masing berinteraksi satu sama lain dalam proses seperti persaingan, penurunan/regenerasi, simbiosis dan alelopati. Berbagai sumber daya dan proses biologis dan fisik ini secara sengaja dimanipulasi oleh sumber daya manusia di dalam sistem tersebut, dengan segala pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan energinya.

D. Akses Permodalan

Modal merupakan merupakan salah satu faktor produksi dalam meningkatkan usaha kelompok masyarakat di pedesaan di samping tanah, dan tenaga kerja. Yang dimaksud modal adalah yang berhubungan erat dengan uang baik yang akan dibelanjakan maupun yang disimpan untuk kemudian di investasikan. Dalam memberdayakan masyarakat pedesaan tidak terlepas adanya modal pertanian. Menurut Mubyarto (1995) modal pertanian selalu dinyatakan nilainya dalam uang, misalnya harga ternak, biaya bajak, harga teknologi produksi dan seterusnya. Uang merupakan alat tukar dan pengukur nilai dimana-mana, termasuk di pelosok-pelosok desa, maka uang dianggap merupakan alat utama untuk menciptakan modal. Sebagian petani dapat memenuhi semua keperluan modalnya dari kekayaan yang dimilikinya, bahkan petani kaya dapat meminjamkan modal kepada petani lain yang memerlukan, namun sebagian petani lainnya hanya dapat memiliki modal yang berasal dari pinjaman luar yang biasanya merupakan kredit.

Kredit merupakan alat untuk menciptakan modal yang terdiri dari kredit investasi dan kredit tidak untuk investasi. Kredit investasi adalah kredit yang dipakai untuk membiayai pembelian barang-barang modal yang bersifat tetap yaitu yang tidak habis dalam suatu proses produksi, misalnya tanah, ternak, mesin-mesin dan lain-lain. Sedangkan kredit yang tidak untuk investasi disebut kredit modal kerja misalnya untuk membeli pupuk, bibit, pestisida atau untuk membayar upah tenaga kerja.

Sebagian ahli berasumsi bahwa masyarakat miskin pedesaan memerlukan kredit karena mereka miskin dan modalnya sangat lemah. Kemudian sebagian lainnya mengkritik asumsi tersebut dengan alasan bahwa kredit tidak merupakan syarat mutlak dalam pembangunan pedesaan. Yang mutlak adalah mendorong motivasi petani untuk menggunakan barang-barang modal dan penemuan-penemuan teknologi baru untuk meningkatkan produksi dengan cara menyediakan alat-alat dan bahan-bahan pertanian di

dekat petani. Setelah petani didorong motivasinya dan ingin membeli alat-alat dan bahan-bahan tersebut, maka kredit akan melancarkan adopsi dan penerapannya dalam usahatani. Dengan kata lain bukan terletak pada ada tidaknya atau perlu tidaknya kredit, melainkan masih sangat terbatasnya kesempatan petani untuk maju atau kurangnya aspirasi mereka. Namun menurut Mubyarto (1995) bahwa dari penelitian-penelitian di Indonesia dan di negara-negara lainnya ternyata bahwa tidak ada keragu-raguan tentang sangat pentingnya kredit bagi kemajuan usahatani. Selanjutnya diungkapkan bahwa petani perlu mendapatkan kredit dengan bunga yang wajar, cukuplah dibuktikan dengan larinya mereka kepada para pelepas uang dan terlibatnya mereka dalam sistem ijon.

Hasil penelitian Sudjanadi (Mubyarto 1995) di daerah karawang disimpulkan antara lain: (a) pemberian kredit usahatani dengan bunga yang ringan perlu untuk memungkinkan petani melakukan inovasi-inovasi dalam usaha taninya, (b) kredit harus bersifat dinamis yaitu mendorong petani untuk menggunakan secara produktif dengan bimbingan dan pengawasan yang teliti, (c) kredit yang diberikan selain merupakan bantuan modal juga merupakan perangsang untuk menerima petunjuk-petunjuk dan bersedia berpartisipasi dalam program peningkatan produksi, dan (d) kredit pertanian yang diberikan kepada petani tidak perlu hanya terbatas pada kredit usahatani yang langsung diberikan bagi produksi pertanian tetapi harus pula mencakup kredit-kredit untuk kebutuhan rumah tangga (kredit konsumsi).

E. Akses Pada Informasi

Akses pada informasi membuat masyarakat perdesaan memiliki pilihan yang lebih banyak bagi jenis informasi yang ingin mereka dapatkan. Kemajuan teknologi informasi seolah-olah membuat semua orang dapat mengetahui apa saja yang ingin mereka ketahui dengan segera. Naisbitt (Kumaratomo dan Subandi Agus Margono, 1996) mengatakan bahwa kita telah menapaki zaman baru yang dicirikan oleh adanya ledakan informasi (*information explosion*) beserta sepuluh kecenderungan pokok yang sesungguhnya menunjukkan bahwa kita telah beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat informasi.

Jika dikaitkan pembangunan masyarakat perdesaan, informasi memegang peranan penting dalam memperkenalkan metode-metode baru, teknologi produksi baru, informasi pasar dan lain-lain. Namun tumpukan informasi tersebut belum menjamin pemanfaatannya akan lebih baik karena tergantung bagaimana mengorganisir informasi tersebut.

Van den Ban dan Hawkins (1999), informasi merupakan sumber daya penting di dalam pertanian modern. Perkembangan komputer dan perbaikan telekomunikasi memberikan petani kesempatan untuk memperoleh informasi teknis dan ekonomis dengan cepat dan menggunakannya dengan efektif untuk pengambilan keputusan. Diungkapkan, jumlah informasi yang dapat dan harus digunakan oleh petani untuk mengambil keputusan semakin cepat bertambah. Informasi ini meliputi laporan hasil penelitian, data pasar, data tentang pertumbuhan dan proses pengelolaan lahan pertaniannya dan yang serupa sebagai pembanding. Informasi ini digunakan untuk memilih teknologi produksi yang paling menguntungkan, menciptakan kondisi pertumbuhan yang optimal untuk tanaman dan ternaknya, menentukan anggaran pengeluaran dan melihat usaha yang paling menguntungkan serta memutuskan kapan dan dimana menjual hasilnya.

Berdasarkan pendapat tersebut maka bagi petani, informasi memegang peranan penting dalam membuka wawasan terhadap dunia nyata yang dihadapinya, karena informasi yang diterimanya akan merubah kebiasaan-kebiasaan sikap berusahatani, kemudian membentuk suatu sikap baru yang merupakan dampak penyesuaian informasi lama dengan sejumlah informasi baru yang diterima. Semakin banyak informasi yang diterima akan semakin banyak perubahan-perubahan untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpuaskan dalam diri petani tersebut.

Informasi tersebut akan semakin membangkitkan motivasi dan kinerja petani untuk mencari ide-ide baru dalam praktek pertaniannya, yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja petani. Untuk mengenali permasalahan yang sebenarnya yang sedang dihadapi dituntut memperoleh informasi yang lebih banyak dan petani yang mempunyai akses terhadap sumber informasi cenderung memperoleh informasi yang lebih banyak. Tetapi hal tersebut tergantung pada karakteristik sumber informasi dan kualitas serta intensitas interaksi antara petani dengan sumber informasi tersebut.

Akses informasi pertanian bukan hanya penting bagi petani saja, melainkan bagi penyuluh merupakan suatu keharusan sebagai bahan penyampaian perkembangan pembangunan pertanian kepada petani. Dengan berkembangnya teknologi informasi, penyuluh dapat memberikan petunjuk yang dibuat untuk setiap lahan pertanian tanpa harus mengunjungi sendiri lahan tersebut. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat,

membuat petani dan penyuluh bisa memilih berbagai alternatif sumber informasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya, baik dari media elektronik seperti radio, televisi dan media cetak seperti surat kabar, majalah, brosur maupun dengan kontak personal. Tersedianya sumber informasi, menyebabkan petani dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkannya dalam membangun pertaniannya tanpa harus kontak langsung dengan penyuluh.

Kaye (Agussabti, 2002) menawarkan langkah-langkah pengolahan data terhadap sejumlah informasi yang telah dikumpulkan dengan melibatkan serangkaian faktor-faktor antara lain:

- (1) Relevansi, apakah informasi tersebut berkaitan erat dengan persoalan yang tengah dihadapi. Apakah informasi itu sesuai dengan perspektif kita dan situasi yang ada
- (2) Akurasi, apakah sumber informasi tersebut layak untuk dipercaya dan dapat diuji kebenarannya
- (3) Kelengkapan, apakah informassi tersebut sudah menerangkan seluruh cakupan yang tengah dipertimbangkan
- (4) Ketajaman, apakah informasi itu menunjukkan perbedaan-perbedaan antara pilihan yang satu dengan yang lain
- (5) Ketepatan waktu, apakah informasi dan data-data tersebut masih berlaku dan absah atau sebaliknya sudah usang
- (6) Keterwakilan, apakah informasi yang dikumpulkan cukup mewakili seluruh kenyataan.

Kemampuan petani dalam mengakses informasi akan berdayaguna jika faktor-faktor tersebut menjadi acuan dalam memanfaatkan informasi untuk usahatani. Informasi media massa penyebarannya lebih bersifat massal yang dapat memperbaiki sistem usahatani, pemasaran dan lebih penting lagi adalah memperbaiki budaya bertani yang belakangan ini masih dianggap berproduktivitas rendah.

F. Rangkuman

Sumber daya alam adalah bagian dari potensi daerah yang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan ummat manusia dikemudian hari. Sebaliknya jika kurang dimanfaatkan justru akan mendatangkan

kerugian bagi manusia dan bagi daerah itu sendiri. Oleh sebab itu sumber daya alam perlu dipelihara dengan baik agar tidak mendatangkan kerusakan bagi kehidupan generasi mendatang. Modal merupakan investasi dalam menumbuhkan

G. Soal Latihan

1. Jelaskan pentingnya dukungan sumber daya alam dalam pengelolaan potensi daerah yang berbasis unggulan dan berdaya saing
2. Sebutkan setidaknya 3 jenis sumber daya alam sebagai potensi ekonomi daerah
3. Jelaskan tujuan dan manfaat permodalan dalam mengelola potensi ekonomi lokal daerah
4. Jelaskan tujuan dan manfaat informasi untuk mendapatkan metode baru, teknologi produksi baru serta informasi pasar dari produk potensi daerah

BAB IV

GAMBARAN DUA KABUPATEN DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

A. Garis Besar Pembahasan

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada gambaran dua kabupaten sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam sebagai potensi daerah yang unggul dan berdaya saing, yakni Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep). Kedua kabupaten tersebut memiliki struktur perekonomian yang berbasis pertanian, perikanan, pertambangan dan pariwisata. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam perkembangan pengelolaan potensi daerah yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (Bruto). Kabupaten Bantaeng memiliki kemampuan yang lebih maju dalam pengembangan potensi daerah, sedangkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, namun masih perlu dikelola dengan baik.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan struktur perekonomian Kabupaten Bantaeng yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan potensi pertambangan, perikanan serta pariwisata sebagai sektor unggulan
2. Menjelaskan struktur perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan potensi pertambangan, perikanan serta pariwisata sebagai sektor unggulan
3. Menjelaskan partisipasi masyarakat Kabupaten Bantaeng dalam pengembangan potensi daerah

C. Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu dari 24 kabupaten /kota di Sulawesi Selatan yang berada di kawasan selatan Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih 120 km dari Kota Makassar. Luas wilayah Kabupaten Bantaeng sepanjang 395,83 km², dengan panjang pantai 21,5 km dan lebar 4 mil atau hanya kurang lebih 0,87 persen dari luas total Sulawesi Selatan. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Bantaeng merupakan desa bukan pesisir yaitu sebanyak 51 desa. Hanya 16 desa yang terletak di daerah pesisir. Kabupaten Bantaeng memiliki 8 kecamatan, dengan 67 desa/kelurahan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Bantaeng berada pada usia produktif yaitu sebesar 64,79 persen dari total penduduk tahun 2010 yang berjumlah 176.699 orang. Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian, yakni sebanyak 59,65 persen, diikuti sektor jasa dan lainnya sebesar 24,57 persen, dan sektor perdagangan/industri sebesar 24,57 persen.

Sebagai daerah agraris, potensi wilayah Kabupaten Bantaeng memberikan peluang masyarakatnya untuk mengusahakan berbagai komoditi pertanian terutama pertanian tanaman padi, jagung, perkebunan dan tanaman hortikultura. Selain itu berpotensi pula untuk tanaman sayuran di wilayah ketinggian, sehingga Bantaeng menjadi daerah penyangga sayuran untuk memenuhi kebutuhan sayur di bagian selatan Sulawesi Selatan. Tanaman hortikultura yang sedang dikembangkan adalah tanaman strowberry dan apel, sehingga ke depan akan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, dan menjadi komoditi unggulan yang dapat mendukung optimalnya potensi agrowisata yang sudah ada di wilayah ini.

Secara umum dalam pengembangan sumber pertanian, Bantaeng memiliki visi untuk menjadikan Bantaeng sebagai kota bibit yang berteknologi, Bantaeng dalam hal pertanian sangat berpotensi sebab Bantaeng memiliki tiga keunggulan yaitu: memiliki lahan subur, air yang berkesinambungan, dan curah hujan yang termasuk dalam hujan basah. Hal inilah yang memungkinkan PDRB bidang pertanian Kabupaten Bantaeng tahun 2011 tergolong tinggi yaitu mencapai 1 trilyun atau 49,09 persen. Selain itu Bantaeng juga memiliki laboratorium pertanian yang bisa digunakan untuk penelitian. *Pertama*, hortikultura yang terbagi atas sayuran, kentang, bawang dan wortel, *kedua* sektor buah-buahan seperti apel, stowbery, manggis dan buah naga. Yang ke *tiga* adalah sektor tanaman pangan yang diharapkan terjadi dua kali lipat hasil produksi dari sebelumnya.

Cara ini bisa dicapai bila sistem yang dipakai adalah “sistem legowo” yaitu tidak ada oposisi terhadap tanaman lain. Sistem legowo ini melahirkan efisiensi biaya, produksi meningkat, dan indah karena adanya ketertataan. Di bidang perkebunan ada kopi, cengkeh, dan kakao. Kabupaten Bantaeng dibagi atas tiga zona wilayah yaitu: *pertama* zona perkebunan ada pada daerah Tompobulu, *kedua* tanaman pangan pada kecamatan Bantaeng yang dikembangkan adalah tanaman pangan, dan di ermes, loka’ yang dikembangkan adalah hortikultura yang terdiri dari sayur dan buah-buahan. Selain pertanian, Kabupaten Bantaeng memiliki pula potensi pertambangan dan energi. Pada tahun 2011 nilai tambah sektor pertambangan sudah mencapai hampir 18,7 milyar atau 0,86 persen. Sedangkan sektor energi listrik, gas dan air bersih tahun 2011 sebesar 12,5 milyar atau 0,57 persen

Potensi lainnya adalah potensi di sektor industri pengalengan ikan, batu bata, gula merah. dan industri pembuatan kasur. Industri pengalengan ikan dapat memberikan peluang bagi nelayan untuk meningkatkan produksinya. Sedangkan industri pembuatan kasur sudah dipasarkan ke provinsi lain seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Potensi daerah di sektor pariwisata dan hotel juga semakin bertambah. Tingkat hunian kamar dan rata-rata lama menginap juga meningkat. Tingkat hunian kamar meningkat dari 21,13 persen di tahun 2009 menjadi 28,81 persen di tahun 2010. Sedangkan rata-rata lama menginap meningkat dari 1,29 malam di tahun 2009 menjadi 1,57 malam di tahun 2010. Namun hotel yang ada di Kabupaten Bantaeng masih dengan kategori hotel non bintang dan akomodasi lainnya.

1. Struktur Ekonomi Kabupaten Bantaeng

Sektor pertanian masih merupakan sektor andalan Kabupaten Bantaeng. Sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan nilai total PDRB Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 dengan sumbangan sebesar 47,15 persen. Perannya sedikit turun dibanding tahun sebelumnya sebagai akibat adanya sektor lain yang mengalami peningkatan. Sektor yang peranannya meningkat di Kabupaten Bantaeng antara lain adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih. Secara keseluruhan struktur perekonomian Kabupaten Pangkep terlihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 6. Persentase Kontribusi PDRB Per Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2012

Lapangan Usaha	Tahun Berlaku			
	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	5,87	49,79	49,09	47,15
2. Pertambangan dan Penggalian	0,79	0,87	0,86	0,92
3. Industri Pengolahan	2,95	2,80	2,67	2,74
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,65	0,64	0,57	0,64
5. Bangunan	5,54	6,14	5,78	5,96
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,22	11,32	12,40	13,60
7. Angkutan dan Komunikasi	2,99	2,85	3,04	3,21
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa	5,93	5,86	5,84	6,32
9. Jasa-Jasa	18,05	19,75	19,75	19,46
10. PDRB	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng, 2013

2. Potensi Bidang Pertambangan

Industri pengolahan tambang nikel sementara dibangun di Kabupaten Bantaeng. Sejak tahun 2013 pembangunan pengolahan tambang dan energi sudah terpublikasi oleh berbagai media dan salah satu perusahaan yang akan ikut bekerjasama adalah PT Argo Morini Indah, perusahaan patungan Indonesia-China. Bahan baku tambang yang akan diolah berkisar 700-900 metrik ton yang akan menghasilkan 50 ton nikel.

Proses masuknya para penanam modal ke Kabupaten Bantaeng tidak melalui proses yang rumit, hal tersebut sejalan pula dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Drs. H. Abdul Gani, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben), para investor mau berinvestasi di Bantaeng dengan membangun smelter, karena Bupati kai memberikan kepastian hukum, mempermudah perizinan dan tidak dipungut bayaran. Dengan dibangunnya pengolahan tambang nikel di Bantaeng diharapkan pula masyarakat di Kabupaten Bantaeng dapat diberdayakan dengan menggunakan tenaga kerja dari Bantaeng. Kawasan tambang yang merupakan kawasan industri besar ditetapkan di Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang. Panjang dermaga yang dimiliki saat ini 700 meter dengan kedalaman surut 8- 9 meter. Ke depan akan ditambah 340 meter dengan kapasitas 300 ribu dead weight tonage (DWT).

Promosi ke mancanegara membuahkan hasil yakni terbukti dengan bersedianya perusahaan patungan Indonesia-China untuk melakukan kerjasama dengan Kabupaten Bantaeng khususnya dalam hal pengolahan tambang Nikel. Dengan dicanangkannya pengolahan tambang nikel ini pemerintah daerah akan mendapatkan perolehan tambahan pendapatan daerah, terlebih pengolahan industri tambang tersebut memiliki nilai strategis untuk bagi hasil pajak. Yang terpenting pula pada industri ini adalah terjadinya penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Untuk itu strategi-strategi pengembangan yang dilakukan adalah dengan tidak mempersulit perizinan penanaman modal dan kerjasama dari pihak investor. Selain itu industri tersebut akan memberikan bukti nyata bahwa kawasan industri Bantaeng layak dijadikan pusat kawasan Industri pengolah tambang Nikel dengan mengajak para investor melihat langsung kawasan yang akan dijadikan pusat pengolahan tambang. Hal lainnya yang tak kalah pentingnya yang merupakan strategi yang paling umum dilakukan untuk semua bidang potensi yang dikembangkan adalah dengan tetap menjaga stabilitas keamanan agar tetap kondusif sebab hanya dengan kondisi keamanan yang baiklah, rezki akan datang ke daerah kita.

3. Potensi Bidang Perikanan

Melalui wawancara langsung dengan kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng diperoleh data bahwa untuk bidang perikanan, pemetaan wilayah eksplorasi dibagi pula menjadi 3 zona yaitu; untuk wilayah pesisir yang dikembangkan adalah rumput laut, sedangkan untuk dataran rendah dan dataran tinggi yang dikembangkan adalah budidaya ikan air tawar. Dengan melihat pemetaan wilayah eksploitasi ini, maka strategi pengembangannya pun akan lebih mudah dilakukan.

Strategi pengembangan bidang perikanan diselaraskan dengan visi Kabupaten Bantaeng yaitu ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Selaras dengan visi tersebut strategi yang dilakukan adalah dengan membangun sistem perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Hal yang tergolong dalam daya saing seperti dengan penerapan teknologi tepat guna, kemudian berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber potensi daerah yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga tetap terus dapat dieskplorasi.

Sektor perikanan di Kabupaten Bantaeng, kegiatannya masih bertumpu pada kegiatan perikanan laut (penangkapan ikan). Untuk pengembangan budi daya ikan air

tawar masih butuh pengembangan lebih lanjut mengingat sebelumnya pengembangannya belum maksimal walaupun sumber daya air tawar cukup melimpah. Di daerah ini dikembangkan pula pengembangan perikanan khusus yakni pembibitan ikan nila gesit, mengingat hal ini telah berkembang dengan pesat di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan dan di Pulau Sulawesi sendiri.

Secara geografis Kabupaten Bantaeng sangat ideal untuk ditetapkan sebagai daerah penghasil induk dan benih berkualitas di kawasan Indonesia Timur, Khususnya di Sulawesi selatan. Kabupaten Bantaeng sudah bekerjasama dengan Pusat perbenihan yang akan menyediakan benih-benih yang dibutuhkan. Hal ini diharapkan akan dapat mendukung pengembangan dan pemasyarakatan teknologi perbenihan ikan Nila unggul di Kabupaten Bantaeng.

Selain ikan nila dikembangkan pula industri Surimi (ikan olahan) yang sudah diekspor ke Jepang. Pengolahan ikan surimi ini memperjelas lagi bahwa Kabupaten Bantaeng memiliki inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dari potensi lokal. Akan tetapi untuk pemasarannya belum di kembangkan dengan baik karena untuk pengembangan ikan olahan dimana bahan bakunya berasal dari laut sering terhambat dengan cuaca ekstrim. Untuk itu solusi yang ditawarkan adalah dengan membudi dayakan ikan Nila unggul, namun hal ini pemasarannya belum sampai ke mancanegara mengingat program ini baru dikembangkan.

4. Potensi Bidang Pariwisata

Untuk pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Bantaeng sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik, sebab untuk kawasan wisata hampir semua zona ada. Hal tersebut membuktikan adanya inovasi pengembangan dengan sistem LEGOWO yaitu keterbukaan yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng dalam membangun setiap potensi daerah yang dimiliki. Hal tersebut diterapkan pula dalam pengembangan kawasan wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi sarana wisata dan perizinan mengatakan bahwa untuk saat ini tempat wisata yang paling banyak dikunjungi adalah Pantai Seruni, dimana pantai ini menawarkan fasilitas wisata yang menarik seperti bananaboat, pemancingan ikan dan fasilitas wisata yang menarik lainnya. Kawasan wisata ini merupakan kawasan wisata yang mirip dengan kawasan pantai wisata di Dubai, dan khusus pantai Seruni merupakan satu-satunya daerah wisata yang beda dari kawasan

wisata yang lain. Dengan pengembangan kawasan wisata yang ada di Kabupaten Bantaeng diharapkan juga memberikan efek positif dengan mengurangi tingkat kemacetan di Kota Makassar. Strategi pengembangan yang dilakukan adalah:

- a. Menjadikan destinasi wisata unggulan di Sulawesi Selatan dengan mengambil contoh ke negara-negara maju dalam hal wisata seperti Dubai sehingga pariwisata Bantaeng dapat berdaya saing.
- b. Melakukan promosi pengembangan lewat IT melalui *website Bantaengtourism* dan *Bantaeng.co.id*.
- c. Melakukan metode kerja sinergitas, yaitu setiap SKPD yang terkait tidak hanya terfokus pada bidangnya masing-masing tetapi saling berkoordinasi dengan cara kerja kolektif koligeal.
- d. Menggunakan pengembangan kawasan wisata dengan sistem LEGOWO.
- e. Tetap menjaga stabilitas keamanan agar tetap kondusif.

Untuk hal promosi kemancanegara, Kabupaten Bantaeng merupakan daerah yang selalu melakukan promosi khususnya kebudayaan dan pariwisata ke rana Internasional seperti yang baru-baru ini dilakukan dengan mempromosikan pentas seni budaya dan wisata ke Jepang. Berikut Gambar foto Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng



Gambar 1. Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng

5. Partisipasi Masyarakat

Mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi daerah yang dimiliki di Kabupaten Bantaeng sangat tinggi, hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Bantaeng sebagai informan (*bpk. Drs. Amir*) mengatakan masyarakat selalu diberi ruang apresiasi untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bantaeng, dengan seringnya dilibatkan dalam rapat-rapat MUSREMBANG maka hal tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk memberikan informasi terkait kawasan apa saja yang ada di pelosok-pelosok Kabupaten Bantaeng yang memiliki potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan. Sebab menurut informan masyarakatlah yang sebenarnya paling tahu menahu mengenai kondisi wilayah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan yang nantinya akan dikomunikasikan ke pada pemerintah setempat untuk ditindak lanjuti. Kegiatan seperti inilah yang merupakan wujud kerjasama antar aktor pembangunan dalam hal melakukan upaya pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Keterbukaan pemerintah daerah setempat dan keinginan menerima saran serta kritikan yang sifatnya membangun inilah yang menjadikan Kabupaten Bantaeng menjadi salah satu Kabupaten percontohan di Sulawesi Selatan. Sebagai warga masyarakat, maka setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setempat selalu mendapat dukungan dan tidak menjadi masalah utama, sebab setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu mendapat respon yang baik dari masyarakat yang betul-betul menyuarakan kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan sepihak saja.

Promosi potensi wilayah yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng, mendapat respon bagi warga masyarakat yang menginginkan kemajuan dan selalu ingin ikut terlibat mempromosikan ke daerah-daerah dengan berbagai cara diantaranya dengan sanak keluarga yang berkunjung. Dengan demikian banyak peluang untuk mempromosikan potensi yang dimiliki, termasuk dengan ikut mempromosikan melalui berbagai media. Sekarang sudah banyak sosial media yang bisa dipakai untuk melakukan promosi potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Bantaeng seperti melalui *Facebook*, *Twitter*, dan *Blackberry Message*. Hal tersebut sangat membantu masyarakat di di kawasan lain yang belum banyak mendapat informasi wisata di Kabupaten Bantaeng.

D. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

1. Struktur Perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Sampai pada tahun 2012 perekonomian Kabupaten Pangkep masih didominasi oleh sektor industri pengolahan. Pada tahun 2012 peranan sektor industri pengolahan terhadap produk domestik bruto sebesar 58,86 persen. Sektor pertanian memberi kontribusi terbesar kedua sebesar 14,03 persen, dan sector jasa-jasa menempati urutan ketiga sebesar 13 persen. Di wilayah daerah kepulauan potensi kelautan dan perikanan sangat berlimpah dan juga kekayaan alam atas bahan galian tambang memberi arti pada kelancaran denyut nadi ekonomi daerah ini. Secara keseluruhan struktur perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terlihat dalam tabel 4 berikut:

Tabel 7. Persentase Kontribusi PDRB Per Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2012 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Lapangan Usaha	Tahun Berlaku			
	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	19,72	19,18	16,94	14,03
2. Pertambangan dan Penggalian	6,04	5,47	4,99	4,14
3. Industri Pengolahan	45,67	44,99	50,78	56,86
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,36	0,34	0,29	0,25
5. Bangunan	2,83	2,80	2,56	2,46
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,93	4,86	4,37	4,04
7. Angkutan dan Komunikasi	3,41	3,23	2,90	2,53
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa	2,94	3,10	2,81	2,69
9. Jasa-Jasa	14,09	16,03	14,38	13,00
10. PDRB	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep, 2013

2. Potensi Bidang Pertambangan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan daerah dengan sebaran bukit karts yang luas. Bukit karts ini membentang di sisi sebelah timur dari ujung selatan sampai dengan utara. Keunikan topografi ini menyimpan potensi yang besar bagi sektor pertambangan. Bukit karts ini mengandung batu kapur, marmer, pasir silika, khromit serta

mineral lain yang bisa dimanfaatkan untuk industri semen, konstruksi, kerajinan rumah tangga dan sebagainya. Pegunungan kapur atau karst yang berdiri tegak dikawasan yang berbatsan dengan Kabupaten Maros dihasilkan ribuan ton batu kapur untuk bahan baku semen dan marmer untuk bahan bangunan. Nilai produksi batu kapur di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2012 sebesar 5.149.443 ton, atau naik 18,37 persen dari tahun 2011. Karst ini juga mampu menarik pengusaha lokal berinvestasi dengan membangun pengolahan marmer di Pangkep. Beberapa tambang marmer yang tercatat sudah dieksplorasi berada di Kecamatan Bungoro, Labbakkang, Balocci, dan Tondong Tallasa. Di Kecamatan Bungoro ini juga terdapat tambang batu kapur yang dikelola pabrik semen PT Semen Tonasa. Keberadaan perusahaan-perusahaan penambangan dan pengolahan bahan galian tersebut diharap kann memberi sumbangan bagi kas daerah.

Layanan cepat kepada investor menjadi harapan Pemerintah Kabupaten Pangkep seperti yang di implementasikan di Kabupaten Bantaeng yang telah dipenuhi investasi. bahkan Pemda Bantaeng telah membatasi investasi ke daerahnya. Pangkep memiliki potensi untuk investasi berbagai jenis tambang dan sektor lain yang bisa dikembangkan. Kemampuan aparat yang lebih optimal akan menunjang sistem layanan perizinan cepat, dan bila itu terlaksana dengan baik maka daerah ini akan lebih cepat perkembangannya.

Selengkap nya nilai produksi pertambangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat dalam tabel 5 berikut:

Tabel 8. Nilai Produksi Pertambangan Menurut Jenis Barang Tambang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008-2012

Jenis Barang Tambang	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
Marmer	M ²	53.788	53.897	65.524,183	64.324	51.232,844
Batu Kapur	Ton	3.891.811	3.925.445	4.318.77	4.350.438	5.149.443,070
Tanah List	Ton	682.440	594.733	739.819,18	564.18	578.973,720

Sumber Data: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pangkep, 2013

3. Potensi Bidang Perikanan

Sama halnya di sektor pertanian dan perkebunan, untuk pengembangan sektor perikanan dan kelautan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki kekayaan dan sumber daya perairan yang melimpah dan beraga. Potensi ini menjadi komoditas unggulan yang selama ini menjadi primadona. Produksi perikanan tangkap hingga tahun 2012 sebanyak 8.624,10 ton, lebih banyak dari tahun sebelumnya sebanyak 7.009,8 ton, termasuk komoditas ikan bandeng. Pemerintah Kabupaten Pangkep kini memaksimalkan komoditas ikan bandeng dan rumput laut, setidaknya untuk dilirik menjadi komoditas ekspor. Pemerintah Kabupaten Pangkep memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sentra ikan bandeng dan rumput laut sehingga kualitas kedua produk unggulan Kabupaten Pangkep tersebut akan semakin ditingkatkan. Pengembangan potensi ikan bandeng dan rumput laut memiliki *multiplier effect* terhadap peningkatan perekonomian lainnya. Berikut Gambar beberapa wilayah yang memiliki potensi pertambangan, perikanan dan pariwisata Kabupaten Pangkep



Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

4. Potensi Bidang Pariwisata

Bukan hanya di sektor-sektor itu saja, tahun ini potensi pariwisata Pangkep juga akan dipicu dan dipacu pengembangannya. Kabupaten Pangkep mempunyai potensi wisata yang berlimpah. Sesuai kondisi geografisnya yang terdiri dari tiga dimensi wilayah yakni kepulauan, daratan rendah hingga pegunungan. Namun belum tergarap optimal. Kondisi tersebut mendorong Pemda Kabupaten Pangkep untuk segera mengolah potensi pariwisata, sebab selain bermanfaat mendatangkan banyak wisatawan, potensi wisata tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meraup keuntungan guna peningkatan kesejahteraan mereka. Jumlah wisatawan asing yang datang di Kabupaten Pangkep hingga tahun 2011 sebanyak 172 orang, dan menurun menjadi 64 orang pada tahun 2012. Wisatawan tersebut berasal dari berbagai Negara seperti Jerman, Austria, Australia, Singapura, Malaysia, Arab Saudi dan Belanda.

Salah satu objek wisata yang akan mulai digarap tahun 2014 ini adalah rumah terapung di Pulau Cambang-cambang. Objek wisata ini akan dikembangkan menjadi salah satu objek wisata bahari di Kabupaten Pangkep. Fokus pengembangan wisata bahari di Pulau tersebut berupa pengaktifan kembali fasilitas *homestay* dan paket wisata.

Wisatawan yang berkunjung akan mendapatkan hiburan yang menyenangkan di atas rumah terapung. Tidak hanya hiburan, para wisatawan juga nantinya dapat melakukan penelitian biota laut Pangkep di atas rumah terapung tersebut. Fasilitas akan mulai dibangun Pemerintah Kabupaten guna mendukung fungsi rumah terapung sebagai tempat hiburan, *refreshing*, pendidikan dan lain sebagainya. Selain rumah terapung di Pulau Cambang-Cambang. Pulau lain yang akan dikembangkan yakni Pulau Kapoposang, Wisata Budaya Bahari Pulau Badi dan Pulau Pa'jennekang, paket wisata alam kars dan pelestarian budaya yang telah mendunia, yaitu Bissu. Pengembangan keempat sektor tersebut akan dilakukan berdasarkan wilayah. Wilayah tersebut sudah dipetakan potensi pengembangannya dan penguatan pembangunan Pangkep di empat sektor tersebut. Misalnya di wilayah pegunungan yakni di Kecamatan Balocci dan Toddong Tallasa, akan dipusatkan sebagai daerah pengembangan sektor pertanian dan peternakan serta holtikultura. Sementara wilayah kepulauan sektor perikanan dan pariwisata menjadi fokus yang akan dikembangkan.

Sebagai penyempurnaan program penguatan pembangunan tahun 2012 di empat sektor tersebut, Pemkab juga akan tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pelayanan yang maksimal seperti pemeliharaan kesejahteraan rakyat, dengan sasaran menurunkan tingkat kemiskinan; Peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang sasarannya meliputi pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana. Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta Peningkatan kualitas sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim, yang sasaran tahunannya adalah: meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam melalui upaya rehabilitasi hutan, penanganan ilegal logging, pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan pemanfaatan lahan secara optimal dan produktif.

E. Rangkuman

Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan memiliki potensi daerah yang unggul dan berdaya saing. Kedua kabupaten tersebut memiliki struktur perekonomian yang berbasis pertanian, perikanan, pertambangan dan pariwisata. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam perkembangan pengelolaan potensi daerah yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (Bruto). Kabupaten Bantaeng memiliki kemampuan yang lebih maju dalam pengembangan potensi daerah, sedangkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, namun masih perlu dikelola dengan baik.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan struktur perekonomian Kabupaten Bantaeng yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan potensi pertambangan, perikanan serta pariwisata sebagai sektor unggulan
2. Jelaskan struktur perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan potensi pertambangan, perikanan serta pariwisata sebagai sektor unggulan
3. Jelaskan partisipasi masyarakat Kabupaten Bantaeng dalam pengembangan potensi daerah

BAB V

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM MENGELOLA POTENSI DAERAH

A. Garis Besar Pembahasan

Pembahasan dalam bab ini berfokus pada pengembangan sumber daya aparatur dengan ruang lingkup yang meliputi kinerja aparatur, proaktif aparatur, inovasi aparatur, dan sikap egaliter aparatur serta model pengembangan aparatur dalam mengembangkan potensi daerah. Searah dengan perkembangan pemerintahan kedepan yang lebih berorientasi pada paradigma pemerintahan yang enterpreneur, maka pemerintahan yang memiliki jiwa usaha atau semangat wirausaha untuk kemajuan masyarakat, dituntut mampu membangun motivasi, kreativitas serta terobosan nyata untuk mengatasi kemelut ketertinggalan dan berbagai permasalahan masyarakat, maka kinerja aparatur seyogyanya perlu terus dibangun agar daerah lebih maju dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan kinerja aparatur, proaktif aparatur, inovasi aparatur, dan sikap egaliter aparatur pada dua kabupaten yakni Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Menggambarkan dan menjelaskan model pengembangan aparatur dalam mengembangkan potensi daerah.

C. Kinerja Aparatur

Kinerja aparatur pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah dapat diketahui dari beberapa indikator kualitatif, yakni: a) bagaimana keterlibatan aparatur daerah dalam perumusan dan penyusunan potensi daerah, yakni potensi sumber daya alam seperti pertanian, pariwisata, pertambangan, dan lain-lain yang berbasis unggulan, b) apakah aparatur daerah sering melakukan pertemuan untuk penyusunan potensi daerah tersebut, c) apakah aparatur daerah sering pula mengikuti pertemuan, seminar, lokakarya dalam perumusan potensi daerah, sehingga wawasan pemikiran aparatur senantiasa mengarah kepengembangan potensi daerah tersebut, dan d) apakah aparatur aparatur daerah senantiasa memikirkan pentingnya investor dalam pengembangan potensi daerah baik investor lokal maupun nasional.

Berdasarkan indikator kualitatif tersebut, ditemukan bahwa di Kabupaten Pangkep para aparatur telah menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam perumusan dan penyusunan potensi daerah sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur daerah, namun keterlibatan tersebut masih bersifat parsial sebagai konsekuensi dari tugas dan jabatan yang diembang, sehingga kurang didasari oleh keinginan dan inisiatif sendiri sebagai sebuah tantangan dalam perumusan dan penyusunan potensi daerah tersebut.

Searah dengan perkembangan pemerintahan kedepan yang lebih berorientasi pada paradigma pemerintahan yang enterpreneur, yakni pemerintahan yang memiliki jiwa usaha atau semangat wirausaha untuk kemajuan masyarakat, dimana aparat dituntut mampu membangun motivasi, kreativitas serta terobosan nyata untuk mengatasi kemelut ketertinggalan dan berbagai permasalahan masyarakat, maka kinerja aparatur seyogyanya memiliki paradigma enterpreneur tersebut. Oleh sebab itu pertemuan aparatur di Kabupaten Pangkep dikembangkan melalui forum SKPD yang diketuai oleh Bappeda dan bekerja membuat rumusan-rumusan potensi daerah kemudian diajukan ke Bupati Pangkep.

Kinerja aparatur dalam mengembangkan potensi daerah ditentukan pula oleh wawasan pemikiran yang dimiliki melalui pertemuan, seminar, lokakarya dan sebagainya. Namun keterlibatan tersebut masih didasarkan pada instruksi dan menunggu undangan sehingga frekuensi keikutsertaan masih sangat kurang. Kendatipun demikian, inisiatif melakukan kajian bersama kelompok-kelompok masyarakat yang sudah maju dalam mengadopsi teknologi selalu dilakukan atas kerja sama balai penelitian daerah. Wawasan

untuk melakukan kerja sama dengan para investor juga masih sangat kurang, walaupun para investor cukup memiliki minat ingin bermitra dengan masyarakat khususnya di sektor pertambangan. Aparatur daerah Kabupaten Pangkep menyadari pentingnya keberadaan investor dalam membantu mengembangkan potensi daerah dan memberikan suntikan dana kepada para petani maupun nelayan yang ingin lebih meningkatkan hasil panennya. Begitupun potensi di sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Akan tetapi pemikiran kearah tersebut belum dilakukan secara maksimal oleh para aparatur daerah.

Sementara kinerja aparatur di Kabupaten Bantaeng dalam pelibatan perumusan dan potensi daerah, pada umumnya menganggap sebagai tugas pokok dalam memanfaatkan, dan mengatur potensi daerah yang dimiliki. Pelibatan tersebut berdasarkan tim work yang melibatkan semua SKPD, unsur masyarakat, dan unsur perguruan tinggi yang dapat memberi pandangan-pandangan dari sisi akademiknya. Pelibatan tim work tersebut bukan hanya sampai pada tahap perumusan dan penyusunan potensi daerah, tetapi juga sering diikuti dalam pertemuan, seminar dan lokakarya. Para aparatur di Kabupaten Bantaeng lebih elegan dan dominan dalam mengembangkan gagasan pengembangan potensi daerah sehingga dapat berdampak positif untuk menarik para investor.

Misalnya keterlibatan aparatur di bidang pertambangan yaitu dalam bentuk pengolahan, namun bahan bakunya diambil dari tenggara khususnya nikel. Dalam memikirkan investor di bidang pertambangan para aparatur sangat antusias sekali dan itu dilakukan langsung oleh Bupati. Para aparatur sering menghadiri perumusan dan penyusunan potensi daerah atas koordinasi langsung dari kepala dinas dan Bupati. Begitupun peranan media sangat penting karena sebelum ada wacana tentang investor, hal inipun sudah dimuat dan diliput di media cetak yang dijadikan sebagai ajang sosialisasi dan promosi pengenalan ke daerah-daerah lain. Selain itu, adanya program “Halo Bantaeng” yang disiarkan oleh TVRI ini sangat membantu memperkenalkan sumber potensi daerah yang dimiliki oleh Bantaeng. Kendala-kendala secara umum adalah pada pemahaman masyarakat khususnya masyarakat awam yang masih kurang mengerti dan paham akan hal tersebut. Tetapi dengan adanya sosialisasi ke masyarakat maka hal tersebut bisa diatasi dan masyarakat bisa menerima. Hanya saja Kabupaten Bantaeng tidak memiliki sumber-sumber tambang yang potensial dibanding daerah-daerah lain seperti Pangkep dan Maros.

Demikian pula keterlibatan aparat di bidang pariwisata sangat tinggi, dan suatu keharusan untuk menghadiri perumusan dan penyusunan potensi daerah, termasuk menghadiri pertemuan, seminar dan lokakarya. Pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan Bantaeng seperti pantai marina, ermes dan pantai seruni. Bantuan media mempromosikan kepariwisataan kepada masyarakat luas sangat membantu sehingga potensi pariwisata banyak diketahui dan dikenal orang serta memiliki prospek untuk mendatangkan investor. Kendala-kendala umum yang ditemui di lapangan dalam pengembangan pariwisata yaitu dari masyarakatnya sendiri yang masih kurang paham terkait hal tersebut. Banyak masyarakat yang mengkalim bahwa tempat itu adalah milik mereka seperti di Ermes dan ini secara otomatis akan menghambat pengembangan wisata Ermes. Namun untuk meminimalisir hal tersebut komunikasi intens kepada masyarakat terus dilakukan.

Kinerja aparat di bidang pertanian dan peternakan diwujudkan dalam penyusunan dan perumusan potensi daerah melalui “Tudang Sepuluh” yang menghadirkan kelompok tani, aparat dan *stakeholders* yang lain. Dalam Tudang Sepuluh ini yang dibicarakan adalah masalah jadwal tanam, jenis komoditi yang ditanam, dan kemudian penguatan kelembagaan. Ini dibicarakan bersama dengan pemerintah kemudian peran pemerintah di sini adalah menyiapkan tenaga penyuluh yang profesional yang dibekali dengan kendaraan.

Terkait dengan investor, yang mendatangkan investor ada dua yaitu pemerintah dan swasta, pemerintah di sini dengan membuat produk sendiri seperti keripik, jus dan lain-lain. Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dalam 5 tahun terakhir memiliki kerja sama yang cukup baik di sektor investasi pengelolaan sumber-sumber potensi daerah, seperti disektor pertanian perikanan, pariwisata maupun investasi pembangunan infrastruktur. Sosialisasi ke masyarakat dilakukan langsung oleh investor, dimana investor ini mendapatkan informasi dari instansi yang terkait. Salah satu investor dari Jepang mengembangkan sektor perikanan beserta infrastruktur pembangunan pelabuhan perikanan yang dapat meningkatkan langsung tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Selain itu dikembangkan pula sektor wisata pantai seruni dan permandian air terjun bissapu. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi positif para aparat dalam mengembangkan potensi daerah.

Keterlibatan aparatur di Kabupaten Bantaeng tidak terlepas dari renstra yang dimiliki masing-masing dinas yang sudah ada sebelumnya. Jadi masalah perencanaan ada tahapan-tahapannya, selalu mengacu pada renstra 2008-2013. Jadi dalam renstra sudah dibuat keterlibatan aparatur. Sehingga untuk menghadiri perumusan, mengikuti seminar, dan lokakarya yang sering dilakukan harus selalu mengacu pada renstra dan dikordinasi langsung oleh BAPPEDA kabupaten.

D. Proaktif Aparatur

Proaktif aparatur pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah dapat diketahui dari beberapa indikator kualitatif, yakni: a) apakah aparatur daerah senantiasa mengidentifikasi sumber-sumber potensi daerah yang berbasis unggulan, b) apakah aparatur daerah sering mengoreksi hasil perumusan dan penyusunan potensi daerah, c) apakah aparatur daerah sering mengikuti pemberitaan dan informasi di media baik cetak maupun elektronik mengenai pentingnya pengembangan potensi daerah, d) apakah gagasan dan pemikiran aparatur daerah senantiasa dikomunikasikan ke institusi pemda lainnya, dan e) apakah aparatur daerah sering terlibat langsung mencari dan mengajak investor dalam pengembangan potensi daerah.

Identifikasi sumber-sumber potensi daerah bertujuan agar dapat diketahui di wilayah mana saja terdapat sumber daya alam unggulan dan berdaya saing tinggi, serta komoditi apa saja yang dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik wilayah yang dimiliki, baik di wilayah pegunungan, daratan maupun di wilayah kepulauan. Kabupaten Pangkep memiliki potensi daerah di sektor kelautan dan perikanan serta sektor perkebunan sebagai sektor penyanggah di bidang pangan. Namun potensi tersebut kurang teridentifikasi secara baik, dan sampai sekarang jarang dilakukan koreksi karena proses penyusunannya sudah melibatkan semua instansi terkait, sehingga semua hasil dari perumusan itu dianggap sudah sempurna.

Aparatur pemerintah daerah perlu pula proaktif mendapatkan pemberitaan dan informasi di media baik cetak maupun elektronik agar lebih termotivasi mengembangkan potensi daerah dan mengetahui peta kekuatan sumber-sumber kekayaan alam yang ada di daerah tersebut. Informasi yang sering didapatkan aparatur Kabupaten Pangkep masih terbatas pada pemberitaan dan informasi di media surat kabar dan buku yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang potensi yang dimiliki Kabupaten Pangkep. Di sektor

pertanian biasanya mendapatkan informasi dan berita dari kementerian pertanian, media trubus dan dari dinas pertanian tanaman pangan provinsi Sulawesi Selatan secara berkala. Demikian pula di bidang pengembangan pariwisata telah diterbitkan buku informasi mengenai objek wisata wilayah kepulauan. Kabupaten Pangkep memiliki wilayah kepulauan dengan 10 lokasi wisata kepulauan, dan 8 lokasi wilayah permandian dan perkebunan. Objek wisata tersebut telah banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Informasi di sektor pertambangan masih sangat kurang di publikasikan, padahal di wilayah ini terdapat tambang batu gunung yang di eksplorasi oleh pabrik semen tonasa sebagai bahan baku. Kendatipun akses pemberitaan dan informasi mengenai seluruh potensi daerah Kabupaten Pangkep sangat terbatas dan belum memadai, namun para aparatur daerah senantiasa mengkomunikasikan dan bekerja sama dengan SKPD lain memikirkan pengembangan potensi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Keterbatasan mendapatkan pemberitaan dan informasi serta upaya-upaya promosi mempublikasikan potensi daerah berdampak pula terhadap minat investor yang masuk, karena para aparatur daerah belum terbiasa secara langsung berhubungan dan mengajak investor untuk mengembangkan usaha di wilayah ini.

Lain halnya di Kabupaten Bantaeng, wilayah ini yang juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memadai seperti hasil-hasil pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata dan sumber air mineral yang diproduksi untuk dikonsumsi secara komersial. Daerah ini memiliki aparat dalam ruang lingkup Bappeda yang berfokus mengidentifikasi potensi sumber daya apa yang dapat dimaksimalkan di Bantaeng untuk dapat dieksport keluar, dan jika perumusan dan penyusunan potensi daerah kurang sesuai dengan yang seharusnya, maka aparat lainnya dilibatkan atau diikut sertakan untuk mengoreksi dan memperbaiki.

Bantuan media elektronik seperti TVRI memiliki peran yang sangat penting membantu aparat Kabupaten Bantaeng mengembangkan potensi daerah. Hal ini disebabkan karena media TVRI lebih banyak menyiarkan informasi pembangunan di daerah, sehingga di Bantaeng media TVRI dianggap sangat penting bahkan telah bermtra dengan media tersebut dengan program siaran “Halo Bantaeng” yang disiarkan satu kali setiap bulan. Upaya ini menjadi salah satu contoh membangun kemitraan dengan media, bagaimana memanfaatkan, mengeksplorasi dan melihat bagaimana daerah-daerah lain mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Selain itu komunikasi dan kordinasi

dengan instansi-instansi lain sebagai tim work multisektor dan multi *stakeholders* menjadi media perekat bagi aparatur dalam mengembangkan potensi daerah.

E. Inovasi Aparatur

Inovasi aparatur pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah dapat diketahui dari beberapa indikator kualitatif, yakni: a) apakah aparatur daerah sering mendapatkan dan menciptakan informasi baru tentang sumber-sumber potensi daerah, b) apakah aparatur daerah telah berusaha mengeksplorasi sumber-sumber potensi daerah tersebut, c) apakah para aparatur sering berinisiatif melakukan rapat atau pertemuan membicarakan sumber-sumber potensi daerah tersebut, d) apakah aparatur daerah sering berinisiatif berkomunikasi dengan pihak investor, dan e) apakah aparatur daerah sering mengkomunikasikan potensi daerah dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan para akademisi.

Informasi baru tentang potensi daerah merupakan informasi yang sangat diharapkan para aparatur daerah, baik yang diperoleh secara personal melalui lisan antar aparat maupun informasi yang didapatkan dari pemerintah atau kementerian yang terkait. Setiap ada informasi baru tentang potensi daerah, maka selanjutnya dibicarakan atau dirapatkan dengan pihak instansi yang ada. Dengan demikian maka identifikasi sumber-sumber potensi daerah akan semakin banyak serta dapat dipublikasikan oleh media baik media cetak maupun media elektronik. Aparatur Kabupaten Pangkep selalu mencoba mengeksplorasi sumber-sumber potensi daerah tersebut, misalnya bagaimana mengembangkan potensi perikanan budi daya baik budi daya air tawar maupun air laut. Kabupaten Pangkep memiliki potensi perikanan yang cukup besar dan sangat prospektif, namun masalahnya adalah terkendala pada sektor pemasaran khususnya pasar ekspor dan tidak adanya pabrik atau industri pengolahan hasil-hasil sumber daya perikanan.

Masalah pemasaran khususnya pasar ekspor dan pengadaan industri pengolahan hasil-hasil sumber daya perikanan hanya dapat diwujudkan jika kerja sama dengan para investor bisa diwujudkan. Hanya saja para aparatur menyatakan kurang merespons dan kurang berpikir untuk bekerja sama dengan investor dan merasa tidak memiliki kewenangan dalam membicarakan masalah investor, walaupun mereka tahu itu penting dalam pengembangan potensi daerah. Demikian pula masyarakat pemilik tambak perikanan menolak berkomunikasi dengan pihak investor apalagi bekerja sama karena

mereka masih takut bekerja sama dengan orang lain, dan mereka ingin mengelola sendiri tambaknya.

Walaupun kurang terjalin komunikasi dengan para investor, namun inisiatif mengkomunikasikan keunggulan potensi daerah kepada masyarakat, pengusaha dan para akademisi tetap dilakukan dalam bentuk tulisan-tulisan atau laporan-laporan melalui buku-buku informasi maupun melalui souvenir bagi para tamu khususnya pengusaha, agar masyarakatpun tahu potensi di daerahnya dan berusaha untuk mengembangkannya. Para aparatur pemerintah Kabupaten Pangkep tetap senantiasa membangun sinergitas terhadap masyarakat agar pengembangan potensi daerah tersebut dapat lebih berkembang, dan merasakan tidak mungkin dapat berjalan sendiri.

Aparatur daerah Kabupaten Bantaeng, memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan informasi baru mengenai sumber-sumber potensi daerah, yakni dengan cara menyerap informasi dari masyarakat melalui rapat kordinasi setiap bulan yang sering dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. Dalam rapat tersebut hadir semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, dalam hal ini Bappeda untuk mendengarkan masukan dari masyarakat. Dalam pertemuan tersebut ada dua hal yang diperoleh yaitu informasi potensi daerah yang bisa dimaksimalkan dan isu-isu permasalahan yang dibicarakan bersama untuk diminimalisir. Hal ini berarti bahwa aparatur di daerah ini memberikan respon yang cukup baik dalam mengeksplorasi sumber-sumber potensi daerah

Begitupun komunikasi dengan para investor, dimana para aparatur melakukan dengan sangat *All out* secara maksimal, bahkan beberapa *event* untuk mendapatkan informasi (*news hot*) mengenai pengembangan potensi daerah didapatkan diluar daerah seperti Jakarta. Sumber informasi masyarakat diluar Kabupaten Bantaeng dapat juga diserap melalui website www.Bantaeng.go.id dan www.thenewbantaeng.com. Komunikasi langsung dengan masyarakat dilakukan dengan antusias dengan cara menghadiri langsung pertemuan tersebut dan paling *welcome* menerima aktivis pengembangan dari luar. Pelibatan masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan dilakukan secara maksimal, sehingga ketika masyarakat memiliki inovasi, maka senantiasa mendapatkan dukungan dan bukti dukungan tersebut dilakukan dengan menghadiri undangan-undangan dari masyarakat.

Hanya saja kendala-kendala yang ditemui dilapangan dalam hal pengembangan potensi daerah adalah adanya multitafsir atau perbedaan persepsi terhadap satu potensi dan bagaimana mengelola atau memanage potensi yang dimiliki. Tetapi dengan pertemuan-pertemuan intens yang dilakukan oleh Bupati dengan program *Coffee morning* setiap setelah apel pagi, maka setiap SKPD yang hadir memberi masukan dan *sharing* untuk menyamakan persepsi. Inovasi seperti ini merupakan penciptaan cara yang baik untuk menyerap pikiran-pikiran segar dari aparatur melalui SKPD yang terlibat.

F. Egaliter Aparatur

Sikap egaliter aparat diartikan sebagai keinginan untuk turun langsung berbaur dengan masyarakat mencari dan memecahkan permasalahan yang timbul dan dirasakan oleh masyarakat. Sikap egaliter aparat menjadi sangat penting untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: a) apakah aparatur pemda sering turun langsung kemasyarakat mensosialisasikan keunggulan sumber daya alam daerah tersebut, b) apakah aparatur sering menghadiri undangan masyarakat dalam pertemuan musyawarah rencana pembangunan, seperti: musrembang, Lembaga Musyawarah Desa (LMD), pelatihan atau semacamnya, c) apakah aparatur sering bersedia menerima aktivis pengembang masyarakat dalam membicarakan pengembangan potensi daerah.

Sikap egaliter aparat pemerintah Kabupaten Pangkep ditunjukkan dengan kegiatan mensosialisasikan keunggulan potensi daerah dengan turun langsung ke tingkat kecamatan dan bertemu dengan semua kepala desa dan melakukan pembinaan kelompok serta bekerja sama dengan para penyuluh. Dalam kegiatan tersebut beberapa aktivitas yang dilakukan misalnya sosialisasi teknologi budi daya bidang perikanan serta pemasarannya dengan membuat tempat percontohan dengan harapan masyarakat nantinya bisa memanfaatkannya. Dengan potensi perikanan yang cukup besar, maka promosi melalui kampanye kerap pula dilakukan dengan mengutus beberapa orang aparat melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kesempatan memperkuat sosialisasi potensi daerah sangat memungkinkan, jika seandainya para aparat lebih berinisiatif dan berkeinginan memanfaatkan forum pertemuan formal seperti musrembang, pertemuan pengurus LMD dan kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Namun kesempatan tersebut kurang

dimanfaatkan secara optimal karena yang sering menghadiri adalah para perwakilan dari masing-masing aparat atau instansi yang terkait.

Sikap egaliter aparat yang koperatif tidak hanya ditunjukkan bagaimana berinteraksi sesama aparatur pemerintah daerah dalam menerima masukan-masukan pengembangan potensi daerah, tetapi dapat pula dilihat dari sikap koperatif menerima masukan dari aktifis pengembang masyarakat yang juga memiliki kepedulian yang tinggi dalam pengembangan potensi daerah. Kenyataannya bahwa para aparat senantiasa bersedia menerima dan koperatif dengan para aktifis, karena mereka juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya, dan asalkan apa yang akan disampaikan tersebut berhubungan dengan peningkatan potensi daerah yang ada di Kabupaten Pangkep.

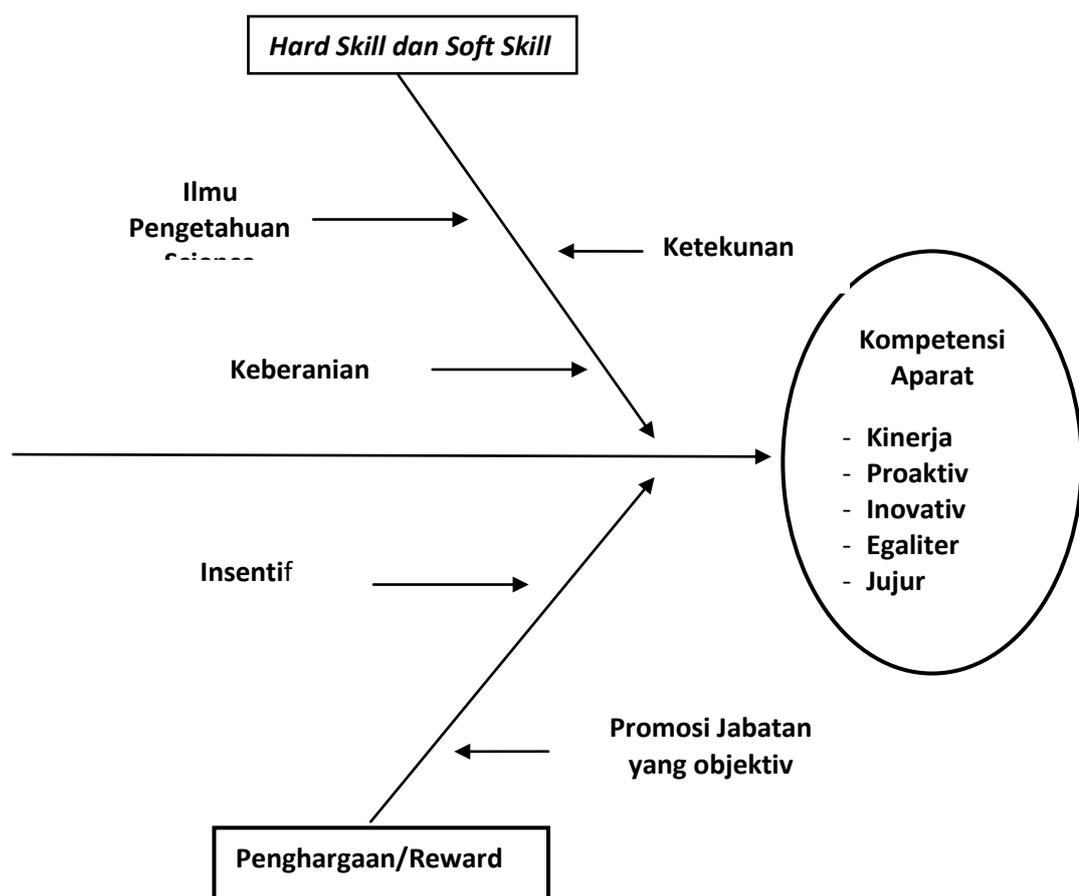
Sama halnya fenomena perilaku egaliter para aparat di Kabupaten Bantaeng yang mencerminkan pentingnya berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan menghadiri langsung undangan pertemuan, karena mereka menganggap hal tersebut sebagai amalan reformasi birokrasi dengan memaksimalkan pelibatan masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan., termasuk sikap egaliter tersebut dengan antusias dan paling *welcome* dalam hal menerima aktifis pengembang dari luar. Inovasi masyarakat dapat berkembang secara baik karena mendapat dukungan langsung dari aparatur dengan menghadiri undangan-undangan dari masyarakat.

G. Model Pengembangan Aparat

Kemampuan pemerintah daerah mengembangkan potensi daerah yang berbasis unggulan dan berdaya saing ditentukan oleh kemampuan aparat pemerintah daerah yang memiliki kompetensi. Sumber daya alam yang beraneka ragam, unggul dan memiliki daya saing ekonomi hanya dapat dikembangkan oleh kualitas aparat yang memadai. Persoalan pemerintahan daerah tidak hanya terkait dengan masalah-masalah pelayanan birokrasi yang kurang efisien dan efektif, tetapi kualitas pengetahuan aparat, ketekunan dan keberanian mengambil tindakan dan keputusan sangat diperlukan agar daerah dapat menambah sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.

Aparat pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang tinggi, selalu proaktif merencanakan dan mengembangkan potensi unggulan yang ada di daerah serta inovatif

mencari terobosan-terobosan baru bermitra dengan para investor, direspon tinggi oleh partisipasi masyarakat, dan berkepribadian yang jujur harus diberi penghargaan baik berupa insentif maupun promosi jabatan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya penanggung jawab pemerintahan tertinggi di daerah perlu berpikir strategis kedepan agar sumber daya manusia aparat pemerintahan di daerahnya dapat dioptimalkan kemampuannya sebagai magnet pengelola sumber-sumber kekayaan yang dimiliki daerah.



Gambar 3. Model Pengembangan Aparat Pemerintah Daerah

H. Rangkuman

Perkembangan pemerintahan kedepan yang lebih berorientasi pada paradigma pemerintahan yang enterpreneur, maka semakin dibutuhkan pemerintahan yang memiliki jiwa usaha atau semangat wirausaha untuk kemajuan masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai jika aparat memiliki kinerja, inovasi, sikap proaktif serta sikap egaliter dalam memajukan daerahnya. Sumber daya alam yang beraneka ragam, unggul dan memiliki daya saing ekonomi hanya dapat dikembangkan oleh kualitas aparat yang memadai

I. Soal Latihan

1. Jelaskan bagaimana mengembangkan kinerja aparatur, sikap proaktif aparatur, inovasi aparatur, dan sikap egaliter aparatur dalam mengembangkan potensi sumber daya alam di ndaerah
2. Gambar dalam sebuah skema model pengembangan aparat dalam mengelola potensi daerah.
3. Jelaskan secara singkat model pengembangan aparat tersebut.

BAB VI

PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA POTENSI DAERAH

A. Garis Besar Pembahasan

Fokus utama pembahasan dalam bab ini adalah pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi daerah. Selain itu dibahas pula model pengembangan partisipasi masyarakat. Pengembangan partisipasi masyarakat merupakan sebuah pendekatan dalam program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi daerah tidak hanya cukup ditangani oleh aparat pemerintah daerah tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh sebab itu keterlibatan masyarakat perlu terus dilakukan baik dalam perumusan maupun dalam pelaksanaan dan evaluasi pengembangan potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan pentingnya mengembangkan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam
2. Menjelaskan proses keterlibatan masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan potensi daerah
3. Menggambarkan dan menjelaskan skema model pengembangan partisipasi masyarakat

C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Daerah

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai kesediaan berperan serta dalam proses pembangunan atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Potensi unggulan daerah akan dapat tereksplorasi dan dikelola dengan baik jika didukung oleh adanya peran serta masyarakat.

Masyarakat sebagai warga setempat dapat mengetahui sektor lapangan usaha mana yang dapat dijadikan sektor-sektor unggulan potensi daerah serta dapat menghasilkan tambahan pendapatan bagi mereka. Itulah sebabnya pengembangan partisipasi masyarakat merupakan sebuah pendekatan dalam program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan partisipasi masyarakat dapat diketahui dari beberapa indikator kualitatif, yakni: a) bagaimana keterlibatan masyarakat (tokoh masyarakat atau pengusaha) dalam perumusan dan penyusunan potensi daerah seperti potensi sumber daya alam (SDA): pertanian, pariwisata, pertambangan, dan lain-lain yang berbasis unggulan, b) apakah masyarakat sering berpartisipasi menghadiri perumusan dan penyusunan potensi daerah tersebut, c) apakah masyarakat sering berpartisipasi/ikut serta menghadiri pertemuan, seminar, lokakarya dalam perumusan potensi daerah, d) apakah gagasan dan pemikiran masyarakat senantiasa mengarah ke pengembangan potensi daerah tersebut, dan e) apakah masyarakat terlibat dalam memikirkan pentingnya investor dalam pengembangan potensi daerah tersebut.

Di Kabupaten Pangkep, partisipasi masyarakat diwujudkan dengan membentuk kelompok bidang pertanian dan kelompok bidang perikanan sebagai potensi unggulan. Kelompok bidang pertanian berfokus pada wilayah pengelolaan sumber daya alam, seperti potensi perkebunan jeruk yang sangat besar untuk bisa memajukan pendapatan daerah di Kabupaten Pangkep. Sedangkan kelompok di bidang perikanan berfokus pada pengembangan udang dan ikan bandeng. Sebagian besar pengurus kelompok dan anggota masyarakat petani dan tambak menyatakan kurang berpartisipasi dan merasa kurang dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan pemerintah daerah, kecuali jika ada keluhan masyarakat tentang tersebarnya wabah penyakit (virus) udang yang melanda petani tambak. Kalaupun ada pertemuan, hanya sebatas wilayah musrembang saja ketika

hanya dimintai pendapat, tetapi tindak lanjutnya dalam bentuk adanya penyusunan dan perumusan tidak pernah dilibatkan. Begitupun jika terdapat masalah di bidang pertanian, tidak ada penyampaian atau bahkan tidak mengetahui dan tidak pernah dipanggil apakah ada atau tidak ada program pemerintah. Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran dalam mengembangkan potensi daerah khususnya pemeliharaan dan pengelolaan hasil perkebunan telah dilakukan secara maksimal, namun seringkali terkendala dengan pemasaran komoditi tersebut karena masyarakat beranggapan bahwa mereka kurang diberi ruang untuk bisa memasarkan secara baik hasil sumber daya alam tersebut. Hal ini berarti tanggung jawab dan partisipasi masyarakat menyampaikan gagasan khususnya peningkatan bidang pertanian telah menjadi sebuah kesadaran kolektif masyarakat untuk kemajuan daerah Pangkep sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Demikian pula gagasan atau pemikiran masyarakat untuk menggaet para investor baik investor lokal maupun nasional telah menjadi sebuah keinginan, karena sebenarnya masyarakat menilai masuknya investor merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membantu kekurangan dana yang dibutuhkan.. Bagi mereka, keberadaan investor akan dapat meringankan dan membantu permodalan usaha yang mereka kembangkan. Hanya saja karena mereka tidak tahu bagaimana cara mendatangkan investor agar hasil produksi perikanan khususnya hasil tambak dapat dipasarkan dengan baik. Andaikata mereka tahu caranya, maka mereka akan berusaha mendatangkan investor. Keterbatasan jaringan dan pengetahuan yang dimiliki membuat para investor kurang tertarik untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Hal ini berarti masyarakat perlu terus diberi pengetahuan dan pemahaman cara mereka berkomunikasi dan mengembangkan diri sendiri, agar memiliki kemampuan berpartisipasi secara maksimal dalam pembangunan daerah. Komunikasi pihak pemerintah daerah dengan banyak memberi informasi kepada masyarakat, sangat mereka harapkan sehingga kerja sama dapat mereka rasakan dengan baik.

Salah satu penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi daerah karena tertutupnya informasi dari pihak pemerintah daerah dan kurangnya pertemuan dengan mereka. Informasi yang mereka dapatkan tentang sumber-sumber potensi daerah diperoleh melalui diskusi-diskusi bersama kelompok-kelompok masyarakat. Itupun jarang dilakukan kecuali terdapat masalah yang dikeluhkan masyarakat. Kurangnya komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat

berakibat kurangnya ruang masyarakat melakukan koreksi dan perbaikan rumusan potensi daerah.

Akan tetapi partisipasi masyarakat mengikuti pemberitaan dan informasi di media senantiasa dilakukan, dan dari hasil informasi tersebut masyarakat memiliki referensi untuk mengeksplorasi sumber-sumber potensi daerah tersebut. Inisiatif mengomunikasikan keanggota dewan ketika melakukan reses, pengusaha dan akademisi melalui seminar tentang sumber-sumber yang akan dieksplorasi juga sering dilakukan, namun tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut kurang diimplementasikan.

Di Kabupaten Bantaeng keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan penyusunan potensi daerah khususnya pertanian dan semua program-program dari pemerintah sangat didukung oleh masyarakat sehingga semua perencanaan di tingkat kabupaten itu terumus dengan baik dan ketika disampaikan kepada masyarakat, maka masyarakatpun menerimanya dengan baik pula. Hal inipun didukung dengan seringnya menghadiri perumusan dan penyusunan potensi daerah yang dimiliki, karena hal tersebut dapat menghimpun semua masukan-masukan dari masyarakat. Selain itu masyarakatpun sering mengikuti pertemuan melalui kelompok tani yang dipandu langsung oleh pemerintah daerah. Dalam pertemuan itu gagasan-gagasan masyarakat kebanyakan kearah pengembangan potensi pertanian. Masyarakat juga terlibat dalam memikirkan investor dalam pengembangan pertanian seperti investor dari Malaysia, Korea dan Jepang. Ketika mereka datang ke Bantaeng respon masyarakatpun sangat baik, agar kerjasama dengan investor tetap terjalin pula dengan baik.

Partisipasi masyarakat diwujudkan pula dalam mengidentifikasi sumber-sumber potensi yang dimiliki seperti potensi perkebunan yang terkenal di Kabupaten Bantaeng yakni coklat dan cengkeh di daerah Tompobulu. Selain itu ada pula *strowbery* dan talas yang dicoba pula untuk dikembangkan. Jika ada perumusan dan penyusunan yang tidak sesuai maka masyarakatpun sering ikut mengoreksi, akan tetapi sifatnya membangun bukan menggagalkan dan hal tersebut membantu pemerintah dalam memperbaiki strategi.

Selain itu media sangat penting dalam pengembangan potensi yang dimiliki untuk dipromosikan dan disosialisasikan ke masyarakat luas antara lain melalui radio daerah yang dikenal radio pantai selatan yang selalu menginformasikan masalah pengembangan potensi daerah Bantaeng. Jika ada gagasan dari masyarakat segera dikomunikasikan melalui kelompok tani ke pemerintah dan begitupula sebaliknya. Jika ada informasi baru tentang potensi daerah, masyarakatpun sering memperolehnya dan mengeksplorasi potensi

daerah tersebut. Berbicara masalah investor nampaknya animo masyarakat sangat tinggi, khususnya investasi dibidang pertanian yang merupakan salah satu potensi unggulan di Kabupaten Bantaeng. Investor sendiripun biasanya datang karena memang daerah tersebut sudah banyak dikenal. Pada masyarakat nelayan sudah dibentuk kelompok wirausaha nelayan, akan tetapi pendanaannya belum diimplementasikan dengan baik, namun demikian hasil laut para nelayan sudah di pasarkan keluar daerah Bantaeng seperti Makassar. Inipun merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan media yang mempromosikan sumber-sumber potensi daerah, khususnya hasil laut seperti ikan dan rumput laut. Masyarakat masih sering mencari sendiri investor untuk datang langsung serta memasarkan sendiri hasil produksi laut yang diperoleh. Namun untuk pengembangannya masyarakatpun melakukan kerjasama dengan pemerintah terutama jika ada informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan. Hal tersebut di sampaikan langsung melalui kelompok nelayan yang kemudian diteruskan ke pemerintah daerah. Masyarakatpun sering mengikuti perkembangan melalui media mengenai pentingnya pengembangan potensi daerah. Hanya saja jika mereka membandingkan dengan kondisi yang dihadapinya masih sering berbeda dengan pengaturan pengembangan dari pemerintah sendiri, karena di sisi lain mereka sering mengembangkan sendiri tanpa bantuan langsung dari pemerintah seperti penyediaan bibit tanam dan penyediaan peralatan-peralatan lainnya. Walaupun demikian kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengeksplorasi sumber-sumber potensi daerah khususnya potensi laut yang dimiliki Bantaeng cukup bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat di sekitarnya.

Kabupaten Bantaeng merupakan Kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki suatu potensi spesifik yang tidak dimiliki oleh daerah kabupaten lainnya. Spesifiknya adalah karena kabupaten Bantaeng terkenal dengan wilayah tiga dimensi yaitu darat, pegunungan, dan pesisir. Ketika berbicara masalah pesisir potensi agrowisata ada disana seperti gunung loka, dan gunung latimojong. Bantaeng memiliki wilayah pesisir sepanjang jalan, dan potensi laut tersebut dijual sebagai objek wisata yang salah satunya adalah pantai Marina, dan ketika melihat dimensi daratnya bisa dilihat potensi pertanian yang dimiliki.

Keterlibatan masyarakat sangat tinggi dalam pengelolaan potensi daerah. Peranan pemerintah hanya sebatas fasilitator. Tujuan pemerintah daerah itu sendiri adalah bagaimana membangun objek wisata agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tumbuhnya ekonomi masyarakat, aktivitas ekonomi yang terjadi di

sekitar objek wisata akan meningkat pula, dan sekaligus akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara tidak langsung menambah pula pendapatan daerah.

Gagasan dan pemikiran masyarakat senantiasa pula mengarah kepada pengembangan peningkatan bidang keamanan, keindahan dan keramahan masyarakat, agar dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Bantaeng. Gagasan ini sering dikomunikasikan melalui pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan bersama pemerintah daerah. Selain itu untuk menunjang pembangunan wisata pemerintah terus membangun infrastruktur penunjang untuk menarik daya tarik wisata. Disini pula peranan media sangat penting dalam mempromosikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas secara umum.

Pengembangan potensi daerah di Kabupaten Bantaeng ini dibuktikan pula dengan adanya pemikiran dan ide-ide baru dan inovatif langsung dari Bupati yang dapat pula menambah daya tarik bidang pariwisata. Dengan demikian kegiatan dalam mengeksplorasi sumber-sumber potensi daerah yang dimiliki tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata akan tetapi masyarakatpun ikut andil dalam kegiatan tersebut.

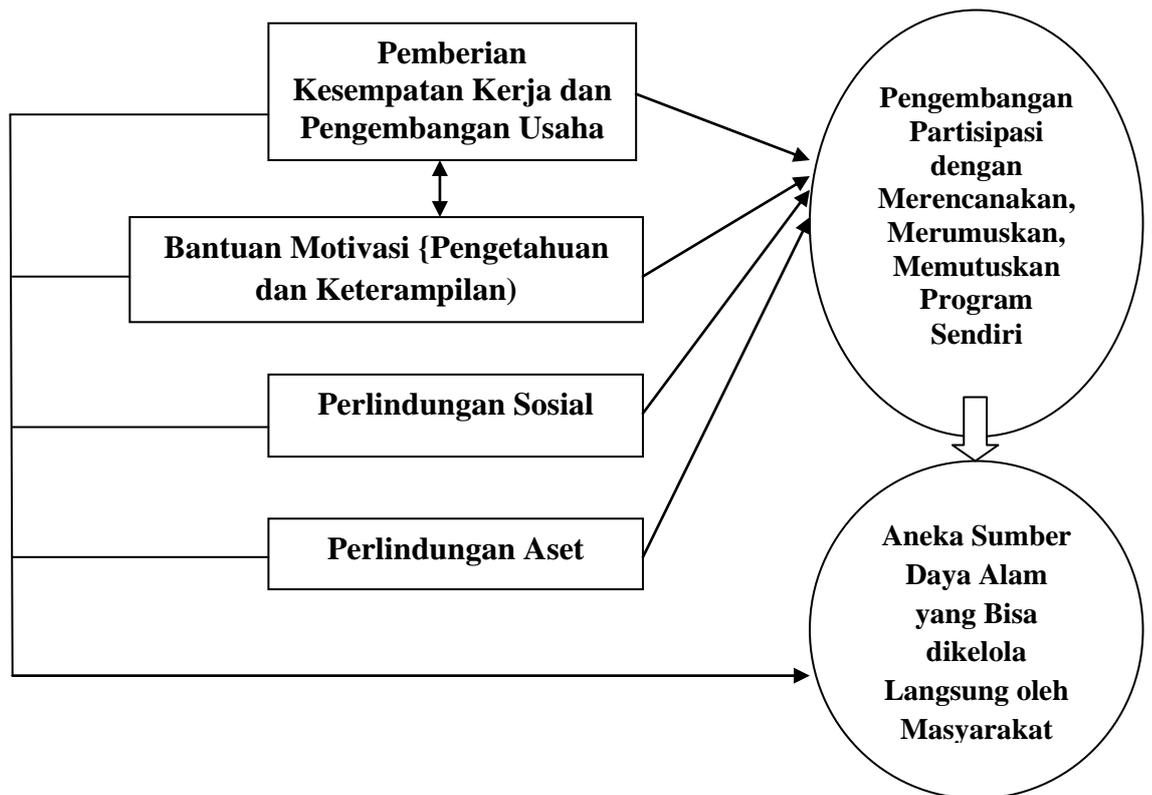
Stabilitas pemerintah dalam meningkatkan keamanan juga menjadi prioritas utama serta peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara objek wisata juga sangat diperlukan. Pengembangan potensi daerah senantiasa melibatkan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya koordinasi langsung dari pemerintah ke masyarakat dalam menentukan potensi daerah yang dapat dikembangkan. Dan jika memang berpotensi maka masyarakat dengan senang hati melaksanakannya. Selain itu masyarakat juga sering memperkenalkan potensi daerah yang dimiliki khususnya pariwisata dan pertanian kepada masyarakat luas di luar Bantaeng. Kegiatan ini pula dapat mendatangkan wisatawan-wisatawan lokal maupun nasional untuk berkunjung ke Bantaeng. Jadi secara tidak langsung kita mencari dan mendatangkan sendiri investor untuk dapat menanamkan modalnya ke Bantaeng. Secara umum dapat dikatakan bahwa potensi unggulan yang ada di Kabupaten Bantaeng adalah pada sektor pariwisata dan pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bantaeng.

D. Model Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Sebagai upaya untuk memaksimalkan kemampuan masyarakat mengembangkan potensi daerah berbasis unggulan dan berdaya saing khususnya potensi sumber daya alam lokal seperti pertanian, pertambangan, perikanan dan pariwisata setempat secara riil, agar mereka dapat lebih memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan, maka perlu mengembangkan model *community base natural resource development participation* yang merupakan program yang penting untuk dikembangkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Prasetyo, Marimin dan Andang Samsudin S (2009) menunjukkan kesadaran masyarakat mampu memaksimalkan potensinya sendiri lebih ditentukan oleh kreatifitasnya di dalam kelompok dan bukan karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Karena itu, model pengembangan partisipasi masyarakat perlu diperluas agar ke depan mereka mampu memberdayakan dirinya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa masalah ketidakberdayaan masyarakat tidak selamanya disebabkan karena ketiadaan modal sekalipun modal tetap dipentingkan. Namun, lebih banyak dikarenakan kesadaran dan etos kerja yang belum terbangkitkan agar dapat ke luar dari masalah ekonomi yang dihadapi. Untuk itu, dalam kajian ini paling tidak diperlukan empat intervensi eksternal yakni; penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan berusaha, bantuan motivasi dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan, perlindungan sosial, dan perlindungan asset usaha. Selanjutnya, implementasi perluasan program pemberdayaan berbasis potensi sumber daya lokal dan ekonomi kreatif merupakan model strategi yang ensensi dan urgensi untuk dikembangkan. Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai solusi tersebut, adalah kita gunakan model pengembangan kemandirian yakni salah satu pilarnya adalah dengan cara memberikan peluang kesempatan kepada masyarakat untuk merumuskan dan memutuskan program yang akan dikerjakan serta bekerja dan berusaha sesuai dengan kondisi ekonomi lokal yang dimiliki

Model ini sangat argumentatif, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya masih banyak sumber daya alam di wilayah daerah penelitian ini yang belum digunakan secara optimal. Sebagai contoh masih banyaknya sumber perikanan, pariwisata, dan sumber pertanian lainnya tanaman perkebunan yang belum digunakan secara optimal selain hanya sebagai konsumsi rumah tangga saja. Selain itu, hasil pertanian, perikanan juga hanya dikonsumsi begitu saja tanpa diolah lebih lanjut yang dapat memberi nilai

tambah lebih selain memberikan kesempatan kerja sendiri. Ada beberapa desa di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep yang memiliki sumber daya produktif tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Tujuan pemberdayaan ini adalah memberi peran serta aktif yang lebih besar kepada mereka untuk menjadi subyek dalam pembangunan atau sebagai manusia pembangunan dan bukan sebagai beban pembangunan. Berikut deskripsi model pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya alam yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat.



Gambar 4. Model Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam

E. Rangkuman

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan potensi daerah. Peranan pemerintah hanya sebatas fasilitator. Kewajiban pemerintah daerah itu sendiri adalah bagaimana membangun keterlibatan masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tumbuhnya ekonomi

masyarakat, aktivitas ekonomi yang terjadi akan meningkat pula, dan sekaligus akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara tidak langsung menambah pula pendapatan daerah. Demikian pula gagasan dan pemikiran masyarakat senantiasa pula diharapkan agar dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan pentingnya mengembangkan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam
2. Jelaskan proses keterlibatan masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan potensi daerah
3. Gambarkan dan Jelaskan skema model pengembangan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Agussabti. 2002. "Kemandirian Petani dalam Pengambilan Keputusan Adopsi Inovasi." Disertasi. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor
- Bank Dunia. 2007. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. (Terjemahan) Penerbit: *The World Bank*
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2001. *Pembangunan Daerah*. <http://www.bappenas>, diakses tanggal 8 Maret 2012 pukul 11.00 wita.
- Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, 2007, *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*, BPS, Jakarta Indonesia
- Badan Pusat Statistik, 2011. *Statistik Daerah Kabupaten Bantaeng*, Penerbit BPS Kabupaten Bantaeng.
- Badan Pusat Statistik, 2012. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantaeng*, Penerbit BPS Kabupaten Bantaeng
- Badan Pusat Statistik, 2012. *Statistik Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, Penerbit BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Badan Pusat Statistik, 2012. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, Penerbit BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Bryant, C and White, L.G, 1982. *Managing Development in The Third World*, Boulder Colorado: Westview Press.
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gunawan dan Sugiyanto, 2008. *Kondisi Keluarga Fakir Miskin (Penelitian Kasus di 17 Provinsi)*, Jakarta: Balitbang Depsos RI
- Hidayati, Nurfitri. 2011. *Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam di Era Otonomi Daerah di Kabupaten Gowa (Makalah) Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik*, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kartasasmita, G., 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kumorotomo, W., dan A.M. Subando. 1996. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mubyarto. 1984. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM

- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES
- Nasikun, 1995, *Kemiskinan di Indonesia Menurun*, dalam *Perangkap Kemiskinan, Problem, dan Strategi Pengentasannya*, (Bagong Suyanto, ed), Airlangga University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta
- Poerwadarminta, WJS, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka
- Prasetyo, P. Eko, Marimin dan Andang Samsudin S. 2009. Model Kaji Tindak Pembangunan Partisipatif Untuk Pengentasan Kemiskinan dan Rawan Pangan Berbasis Potensi Lokal dan Ekonomi Kreatif (Penelitian Hibah Kompetitif), Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Republik Indonesia. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- Syafi'ie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Syaikani, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, 2007. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Sulandri, Susi, dkk. 2010. *Identifikasi Pengembangan Potensi Daerah Kantong-Kantong Kemiskinan Di Jawa Tengah*, Dokumentasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sumihardjo, Tumar, 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, Fokusmedia, Bandung.
- Susanto, Irwan dan Kristono, 2011. Analisis Fishbone (Isikawa Diagram), <http://irwansst.blogspot.com>. Diakses tanggal 8 Maret 2012 Pukul 17.00 wita.
- Thomas, V. 2001. *The Quality of Growth*. Alih Bahasa: Marcus Prihminto Widodo. Editor: Y. Dwy Helly Purnomo. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tomo, Alamsyah. 2012. Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Unggulan di Era Otonomi Daerah, Kasus Kabupaten Jeneponto (Makalah), Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang pemanfaatan sumber daya alam
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- Uphoff, N. 1988. *Local Institutional Development*. Fransisco: Cornell University Press

Van den Ban, A.W, dan H.W. Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. (Terjemahan) oleh: Agnes Dwina Herdiasti. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Peraturan Pemerintah No. 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Wally, Ibrahim Abdulmani, 2010 Potensi Daerah Sebagai Dasar Penentuan Konsep Pengembangan Bidang Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Buru <http://digilib.its.ac.id/ITS-Master>, diakses tanggal 11 Maret 2012 Pukul 8.00 wita.

Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijo, 2007. *Managemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT Komputindo Gramedia

<http://makassarkota.go.id>, Produksi Gracelania Capai 28.000 Ton, Diakses tanggal 25 Oktober2008, Pukul 10,00 wita

